

**ANALISIS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEKS***  
**(Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**  
**SAVITRI DEVI ARYANI**  
**NIM. 1717202046**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PURWOKERTO**  
**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Savitri Devi Aryani

NIM : 1717202046

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*  
Perbankan Syariah Berdasarkan *Islamic Social Reporting*  
*Indeks* Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia  
Tahun 2017-2019

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 7 Juli 2021

Saya yang menyatakan



Savitri Devi Aryani

NIM 1717202046

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***  
**PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING***  
***INDEKS* STUDI KASUS BANK UMUM SYARIAH**  
**DI INDONESIA TAHUN 2017-2019**

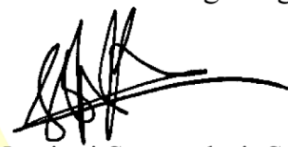
Yang disusun oleh Saudari **Savitri Devi Aryani NIM 1717202046** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji



Dr. Atabik, M.Ag.  
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji



Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.  
NIP. 19780716 200901 2 006

Pembimbing/Penguji



Ubaidillah, S.E., M.E.I  
NIP. 19880924 201903 1 008

Purwokerto, 29 Juli 2021

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

**Assalamu'alaikum wr.wb**

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Savitri Devi Aryani NIM. 1717202046 yang berjudul :

**ANALISIS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEKS* STUDI KASUS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017-2019**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah (S.E)

**Wassalamu'alaikum wr.wb**

# IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 7 Juli 2021



Ubaidillah S.E., M.E.I

NIP. 19880924 201903 1 008

**MOTTO**

*“Saingan terberat bukan pada oranglain, melainkan pada diri sendiri”*



**ANALISIS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN *ISLAMIC SOCIAL  
REPORTING INDEKS*  
(Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019)**

SAVITRI DEVI ARYANI  
NIM. 1717202046

E-mail : [deviaryani360@gmail.com](mailto:deviaryani360@gmail.com)

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Pertumbuhan industri saat ini terbilang cukup pesat, bukan hanya industri yang bergerak dibidang barang, namun juga dalam bentuk jasa. Salah satunya adalah lembaga keuangan syariah. Perkembangan jaman yang membawa kemajuan pesat dalam dunia industri ini menyebabkan meningkatnya kemampuan perusahaan dalam mengeksplorasi alam. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait tanggung jawab sosial perusahaan sangatlah diperlukan guna mengontrol setiap perilaku serta tindakan perusahaan.

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Bank Umum Syariah (BUS) dengan menggunakan *Islamic Social Reporting Index* (ISR). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif deskriptif. Dengan objek penelitian yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah dan BNI Syariah. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode angka indeks. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan tahunan 2017-2019 yang diperoleh dari website resmi masing-masing bank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan *Islamic Social Reporting Indeks* pada Bank Umum Syariah periode 2017-2019 pada indikator pendanaan dan investasi yang memiliki skor tertinggi adalah Bank Muamalat Indonesia sedangkan skor terendah pada BRI Syariah. Pada indikator produk dan jasa, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan skor terendah sedangkan bank yang lainnya memiliki skor yang sama. Pada indikator karyawan Bank Syariah Mandiri memiliki skor tinggi dan BRI Syariah memiliki skor terendah. Pada indikator masyarakat, BRI Syariah mendapat skor tertinggi dan Bank Muamalat memiliki skor terendah. Pada indikator lingkungan, BNI Syariah memiliki skor tertinggi dan Bank Syariah Mandiri memiliki skor terendah. Pada indikator terakhir yaitu tata kelola perusahaan, Bank Muamalat dan Bank BNI mendapat skor tertinggi sedangkan terendah terdapat pada BRI Syariah.

**Kata kunci** : *Pengungkapan, Corporate Social Responsibility, Bank Syariah, Islamic Social Reporting Indeks.*

**ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE  
OF SHARIA BANKING BASED ON ISLAMIC SOCIAL  
REPORTING INDEX  
(STUDY OF ISLAMIC COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA 2017-  
2019)**

SAVITRI DEVI ARYANI

NIM. 1717202046

E-mail : [deviaryani360@gmail.com](mailto:deviaryani360@gmail.com)

Department of Islamic Banking Faculty of Islamic Economics and Business, State  
Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

**ABSTRACT**

The current industrial growth is quite rapid, not only industries engaged in goods, but also in the form of services. One of them is Islamic financial institutions. The development of the era that brings rapid progress in the industrial world has led to an increase in the company's ability to explore nature. Therefore, government policies related to corporate social responsibility are needed to control every company's behavior and actions.

The purpose of the study was to determine the level of disclosure of Corporate Social Responsibility of Islamic Commercial Banks. Using the *Islamic Social Reporting Index* (ISR). This research includes descriptive quantitative research. With the object of research, namely Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah and BNI Syariah. The research method used in this study is the index number method. The data used is secondary data in the form of the 2017-2019 annual report obtained from the official website of each bank.

The results show that Corporate Social Responsibility Disclosures based on the *Islamic Social Reporting Index* at Islamic Commercial Banks for the 2017-2019 period on funding and investment indicators that have the highest score are Bank Muamalat Indonesia while the lowest score is BRI Syariah. On product and service indicators, Bank Muamalat Indonesia received the lowest score while other banks had the same score. In the employees indicators, Bank Syariah Mandiri have a high score and BRI Syariah has the lowest score. On the community indicator, BRI Syariah got the highest score and Bank Muamalat had the lowest score. On environmental indicators, BNI Syariah has the highest score and Bank Syariah Mandiri has the lowest score. In the last indicator, namely corporate governance, Bank Muamalat and Bank BNI got the highest score while the lowest was in BRI Syariah.

**Keywords:** *Disclosure, Corporate Social Responsibility, Islamic Bank, Islamic Social Reporting Index.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)



ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## IAIN PURWOKERTO

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis lengkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau dhammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokasi Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	dammah	Ditulis	U

### Vokasi Panjang

	جاهلية	Ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>karim</i>
4	Dammah	Ditulis	U
	فرض	Ditulis	<i>furud'</i>

### Vokasi Lengkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### Vokasi Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mngikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur yang sangat dalam atas segala nikmat dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi ini akan saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, hidayah, serta kesempatan kepada penulis untuk terus belajar mengembangkan diri
2. Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Sarto dan Ibu Darini yang selalu mencurahkan segala kasih sayangnya, motivasi dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
3. Adikku tercinta, Asraf Thoriq Al Cahyo yang selalu memberikan semangat dan senyuman dengan tingkah lucunya.
4. Dosen pembimbingku, Bapak Ubaidillah S.E., M.E.I yang telah membimbing skripsi saya dari awal hingga akhir dengan penuh kesabaran.
5. Semua keluarga dan sahabat yang selalu ada dan selalu memberikan semangat kepada saya
6. Seluruh keluarga besar IAIN Purwokerto atas segala bentuk kerjasamanya.



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada pengikutnya. Semoga kita senantiasa mengamalkan semua ajarannya dan kelak semoga mendapat syafa'atnya di hari akhir. Aamiin.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya petunjuk, arahan, bimbingan serta bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Chakim S. Ag, M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Ubaidillah S.E., M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, inspirasi, motivasi dan waktu kepada peneliti.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain-lain.
11. Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Sarto dan Ibu Darini yang selalu mencurahkan segala kasih sayangnya, motivasi dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
12. Adikku tercinta, Asraf Thoriq Al Cahyo yang selalu memberikan semangat dan senyuman dengan tingkah lucunya.
13. Terimakasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan untuk mendapatkan gelar sarjana.
14. Terimakasih untuk Faizal Gian Praditya yang selalu setia memberikan semangat dan selalu memberi waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis.
15. Teman terdekat penulis Kholifatus Sa'diyah, Ridha Nindya, Desti Romadoni, Istna Mufidah, Vina Dwi, Hari Ayuningtyas, Tri Puji Astuti, Vivi Nurrofifah, Laila Soviyatun, Frina Dian, dkk yang bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas motivasi, semangat dan doa dukungan untuk mendapatkan gelar sarjana
16. Teman-teman seperjuangan penulis kelas Perbankan Syariah B 2017, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini baik suka maupun duka.
17. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Aamiin

Purwokerto, 07 Juli 2021



Savitri Devi Aryani  
NIM. 1717202046



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kajian Teori .....	12
C. Kerangka Berpikir.....	41
D. Landasan Teologis .....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	46
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	46
D. Variabel dan Indikator Penelitian.....	48



E. Pengumpulan Data Penelitian .....	51
F. Analisis Data Penelitian .....	51
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Hasil Penelitian .....	53
B. Hasil Analisis Penelitian .....	55
C. Interpretasi Hasil .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Asset Perbankan Syariah .....	3
Tabel 2.1 : Kajian Pustaka .....	10
Tabel 2.2 : Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia 1940-1980 .....	31
Tabel 2.3 : Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 1983-2008.....	34
Tabel 3.1 : Daftar BUS yang Memenuhi Kriteria Penentuan Sampel .....	47
Tabel 3.2 : Item Pengungkapan dalam ISR.....	48
Tabel 4.1 : Indeks ISR Bank Muamalat .....	56
Tabel 4.2 : Indeks ISR Bank Mandiri Syariah .....	58
Tabel 4.3 : Indeks ISR BRI Syariah.....	60
Tabel 4.4 : Indeks ISR BNI Syariah.....	62
Tabel 4.5 : Indikator Pendanaan dan Investasi.....	63
Tabel 4.6 : Indikator Produk dan Jasa.....	64
Tabel 4.7 : Indikator Karyawan .....	65
Tabel 4.8 : Indikator Masyarakat .....	66
Tabel 4.9 : Indikator Lingkungan.....	66
Tabel 4.10 : Indikator Tata Kelola Perusahaan .....	67
Tabel 4.11 : Pengungkapan CSR Bank Syariah Berdasarkan Indikator Indeks ISR.....	68
Tabel 4.12 : Tingkat CSR Bank Umum Syariah Berdasarkan Indeks ISR Tahun 2017-2019.....	68
Tabel 4.13 : Tingkat Predikat Pengungkapan Bank Umum Syariah Pada Tahun 2017-2019.....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Penelitian .....	41
----------------------------------------	----



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 : Tingkat CSR pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Indeks ISR Tahun 2017-2019 .....	72
Grafik 4.2 : Tingkat Pengungkapan CSR pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Indeks ISR Pada Tahun 2017-2019.....	73



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Perhitungan data

Lampiran 1.1 : Pengungkapan Bank Muamalat Indonesia

Lampiran 1.2 : Pengungkapan Bank Syariah Mandiri

Lampiran 1.3 : Pengungkapan BRI Syariah

Lampiran 1.4 : Pengungkapan BNI Syariah

Lampiran 2 : Surat Pendukung

Lampiran 2.1 : Surat Permohonan Judul Skripsi

Lampiran 2.2 : Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Lampiran 2.3 : Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi

Lampiran 2.4 : Surat Bimbingan

Lampiran 2.5 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 2.6 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 2.7 : Daftar Riwayat Hidup



**IAIN PURWOKERTO**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini perusahaan tidak hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi dibutuhkan juga sebuah perubahan di dalam bisnis yaitu, pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) maksudnya adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan kesempatan generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhannya. Generasi masa kini harus memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya alam yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang optimal.

Pertumbuhan industri saat ini terbilang cukup pesat, bukan hanya industri yang bergerak dibidang barang, namun juga dalam bentuk jasa. Salah satunya adalah lembaga keuangan syariah, walaupun lembaga keuangan syariah merupakan elemen baru di Indonesia (Alamsyah, 2010). Perkembangan tersebut ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan yang cukup pesat dalam lembaga keuangan syariah yang berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat, adalah industri perbankan syariah. Industri perbankan syariah dapat memberikan kontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada aktifitas ekonomi produktif, bernilai tambah dan inklusif (Hani, 2017). Bahkan perbankan syariah telah menunjukkan eksistensinya di berbagai Negara.

Perkembangan zaman yang membawa kemajuan pesat dalam dunia industri ini menyebabkan meningkatnya kemampuan perusahaan dalam mengeksplorasi alam. Namun, tindakan perusahaan yang terkadang di luar batas dapat membuat kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait tanggung jawab sosial perusahaan sangatlah diperlukan guna mengontrol setiap perilaku serta tindakan perusahaan.

Dilihat dari segi perkembangan zaman, bank syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 1990-an perbankan syariah di Indonesia menunjukan perkembangannya yang cukup pesat.

Pendirian bank syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam. Pendirian bank syariah diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang kemudian membentuk tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 dan memulai kegiatan operasinya pada tanggal 1 Mei 1992 (Khusnul Fauziah, 2013:12).

Bank syariah idealnya harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum Islam (syariat), atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram (Anshori, 2018). Faktor yang berkontribusi utama yang mempercepat kebutuhan untuk bank syariah adalah larangan riba. Mengacu pada perdebatan oleh modernis mengklaim bahwa apa yang dilarang dalam al-Qur'an adalah bentuk riba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Ali Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Berdasarkan data OJK mengenai perkembangan perbankan syariah berdasarkan jumlah bank sampai Desember 2019, tercatat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 34 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah (BPRS). Untuk perkembangan aset perbankan syariah adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Aset Perbankan Syariah**

No.	Indikator	Jumlah Aset (dalam miliar rupiah)		
		2017	2018	2019
1.	Bank Umum Syariah (BUS)	Rp. 288.027	Rp. 316.691	Rp. 350.364
2.	Unit Usaha Syariah (UUS)	Rp. 136.154	Rp. 160.636	Rp. 174.200
3.	Total aset BUS dan UUS	Rp. 424.181	Rp. 477.327	Rp. 524.564

*Sumber: SPS OJK yang telah diolah*

Perkembangan yang signifikan pada tabel 1.1 tercatat total aset perbankan mencapai angka Rp. 524.564 miliar yang terdiri dari Bank Umum Syariah sebesar Rp 350.364 miliar dan Unit Usaha Syariah sebesar Rp. 174.200 miliar. Angka tersebut meningkat dari total aset perbankan tahun 2017 sebesar 424.181 miliar, tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat sebanyak Rp 47.237 miliar dari total aset perbankan pada tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp. 477.327 miliar. Total aset perbankan masih didominasi oleh Bank Umum Syariah (OJK, 2019).

Seiring dengan pertumbuhan bank yang terus meningkat, maka penilaian kinerja bank sangat penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Peran sosial bank syariah yang memerlukan keadilan sosial dan akuntabilitas, membutuhkan bank untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dapat dijadikan sebagai strategi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah gagasan tanggung jawab perusahaan yang berpijak pada *triple bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*), tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab lingkungan. Perkembangan praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia juga mendapat dukungan dari pemerintah (Farida Ayu, 2017). Kini pengungkapan CSR tidak



hanya berkembang di perekonomian konvensional saja, tetapi juga di perekonomian Islam. Dengan adanya konsep *triple bottom line*, maka sebuah perusahaan memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar, tidak hanya kepada investor dan manajemen tetapi perusahaan juga memiliki peran dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang lebih luas lagi. Perusahaan juga menjadi memperhatikan masyarakat, dikarenakan adanya tanggung jawab tersebut.

CSR telah diatur secara tegas di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Setelah itu tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Gina, 2019:62). Adanya Undang-undang tersebut maka pelaporan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi bersifat wajib (*mandatory*).

Konsep CSR tidak hanya ada pada ekonomi konvensional tetapi juga terdapat pada ekonomi Islam. Konsep CSR dalam Islam sangat berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan praktik bisnisnya menggunakan konsep Islam (Syariah). Siwar dan Hossain (2009) memaparkan bahwa nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dapat digunakan sebagai landasan tanggungjawab sosial perusahaan sama seperti halnya pada perusahaan konvensional. Konsep ini dalam Islam lebih menekankan bentuk ketakwaan umat manusia kepada Allah SWT dalam dimensi perusahaan (Widiawati, 2012).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perbankan menjadi sorotan dikarenakan perbankan syariah saat ini dituntut oleh masyarakat untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosialnya pada laporan tahunan yang dimiliki perbankan syariah tersebut. Setiap perusahaan memiliki

berbagai tingkat dalam kuantitas dan kualitas dalam mengungkapkan item pengungkapan. Informasi yang berkaitan dengan karyawan atau tanggung jawab sosial merupakan item yang paling diungkapkan oleh suatu perusahaan (Desiana, 2018).

Perusahaan yang mampu mengungkapkan CSR dengan baik, akan memberikan feedback yang positif bagi perusahaan. Dalam memperoleh suatu kepercayaan dari berbagai pihak mengenai usaha yang dijalankan, beberapa perusahaan berlomba-lomba untuk memberikan value yang terbaik. Dalam pengungkapan CSR telah banyak dilakukan oleh perusahaan go public di Indonesia yang pada umumnya bergerak dalam bidang pertambangan atau manufaktur, dikarenakan perusahaan tersebut memiliki resiko pencemaran lingkungan yang lebih tinggi ketimbang perusahaan-perusahaan yang lainnya (Apip, 2016:86). Hingga pada akhirnya praktik CSR diikuti oleh sektor perbankan. Namun pada saat ini, pengungkapan untuk tanggung jawab sosial di dunia industri syariah belum mempunyai standar yang baku dari pemerintah terkait mengenai item-item apa yang harus diungkapkan. Hal ini menyebabkan pengungkapan tanggung jawab sosial pada bisnis syariah masih berbeda-beda. Pengungkapan CSR belum sepenuhnya mengungkap informasi tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, dengan adanya ISR guna untuk melengkapi pengungkapan informasi tanggung jawab sosial yang belum termuat di dalam pengungkapan CSR.

Haniffah (2002) menyatakan bahwa selama ini pengukuran untuk pengungkapan CSR pada perbankan syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (GRI). GRI merupakan sebuah organisasi yang dapat membantu memahami dan memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan yang akan timbul, seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, tata kelola organisasi dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi para pelaku bisnis dan pemerintah (Syahputri dan Surenggono, 2019). Padahal saat ini telah dikembangkan standar pengukuran baru untuk CSR pada entitas syariah yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR) yang sesuai dengan prinsip syariah. Indeks ISR diyakini dapat menjadi salah satu standar pengungkapan

*Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sesuai dengan perspektif syariah dan sesuai untuk diterapkan pada perbankan syariah (Ribut & Ari, 2014).

*Islamic Social Reporting* (ISR) adalah perluasan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan perkiraan yang baru dan yang lebih luas dari masyarakat sehubungan dengan peran komunitas bisnis dalam perekonomian (Junaidi, 2019:79). Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam. Semakin berkembangnya suatu entitas maka secara otomatis akan mempengaruhi pula besar tanggung jawab yang diemban terhadap para stakeholder-nya (Haris: 2014).

Indeks ISR merupakan suatu standar pelaporan atas pengungkapan CSR perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini berisi kompilasi item-item perusahaan pengungkapan CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan oleh peneliti selanjutnya sehingga item-item tersebut dianggap relevan untuk digunakan oleh entitas syariah. Adapun beberapa penelitian yang telah mengembangkan Indeks ISR diantaranya: (Haniffa et al., 2002) yang menggagas indeks ISR yang kemudian dilanjutkan oleh (Othman et al., 2009). Adapun (Haniffa et al., 2002) membuat lima tema pengungkapan indeks ISR, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Masyarakat, dan Tema Lingkungan Hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman et al (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu Tema Tata Kelola Perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif Islam dalam AAOIFI (2010) yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi keuangan Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary responsibilities*. Hal tersebut terkait dengan tanggungjawab religius yang melekat pada bank syariah untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan syariat dalam seluruh kegiatan operasionalnya (Junaidi, 2015). Sedangkan pedoman ISR, memiliki dua tujuan yaitu sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah Subhanahu Wata'ala & masyarakat dan

meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan (Isnawati, 2018 ).

Berkembangnya indeks ISR pada suatu lembaga keuangan syariah di Indonesia menjadi perhatian masyarakat dalam pengungkapan laporan tahunan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan syariah. Perkembangan tersebut menyebabkan keharusan bagi lembaga keuangan syariah untuk melaporkan kinerja sosial maupun operasionalnya sesuai dengan pengungkapan indeks ISR. Laporan tahunan bank syariah dapat menjadi salah satu bukti tertulis mengenai kinerja bank syariah tersebut dalam satu tahun.

Dari uraian permasalahan di atas terkait indeks ISR yang sesuai bagi pelaporan keuangan syariah, maka penulis ingin meneliti dengan judul: **“Analisis Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah Berdasarkan *Islamic Social Reporting Index* (Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2019)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

Bagaimana tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Bank Umum Syariah (BUS) dengan menggunakan *Islamic Social Reporting Index* (ISR) ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Bank Umum Syariah (BUS) dengan menggunakan *Islamic Social Reporting Index* (ISR)

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai tingkat pengetahuan *Corporate Social Responsibility* bank syariah di Indonesia dan pengetahuan mengenai Indeks ISR lebih dalam.

## 2. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan bagi bank syariah dalam pengungkapan kinerja sosial yang dilakukan

## 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan menjadi wawasan bagi masyarakat tentang tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* bank Syariah di Indonesia.

## 4. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi atau masukan mengenai kinerja sosial dan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi.

### D. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan rincian yang runtut tentang penelitian ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, diantaranya:

**BAB I** berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

**BAB II** berisi landasan teori dan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang teori-teori yang berhubungan dengan analisis pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perbankan syariah berdasarkan *Islamic Social Reporting Index* dan landasan teologis

**BAB III** berisi metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan indikator penelitian, dan pengumpulan data.

**BAB IV** berisi tentang analisis hasil penelitian yaitu memuat hasil pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perbankan syariah berdasarkan *Islamic Social Reporting Index*

**BAB V** berisi kesimpulan penulis dan saran terkait dengan penelitian penulis

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka, berisi pemaparan teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan ini penulis mendapatkan informasi dari penelitian yang dilakukan penelitian lain dari beberapa jurnal yang berkaitan. Hal ini sangat membantu penulis dalam menganalisis informasi, mengumpulkan informasi, serta menarik kesimpulan dari masalah yang dibahas.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengungkapan CSR menggunakan ISR di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Suci Gus Ryanti Hasani (2020) dengan mengangkat judul Analisis Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah berdasarkan *Islamic Social Reporting Index* Tahun 2014-2018 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasilnya menemukan bahwa tingkat pengungkapan CSR pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2017 secara keseluruhan yakni mencapai 67,98% (informatif). Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan Dea Devita Sari (2018) yang membandingkan pengungkapan ISR pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia menemukan bahwa profitabilitas, leverage, dan jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Kemudian penelitian milik Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho (2013) dengan judul Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah berdasarkan *Islamic Social Reporting Indeks* menggunakan 7 sampel menghasilkan bahwa Bank Muamalat memiliki tingkat pengungkapan tertinggi sebesar 73% dan yang terendah adalah Panin Bank Syariah sebesar 41%. Penelitian yang dilakukan oleh Merry Anggrahini (2015) dengan judul analisis pengungkapan CSR perbankan syariah menggunakan ISR hanya dengan menggunakan 1 (satu) tahun penelitian mendapatkan hasil bahwa bank Muamalat memiliki persentase tinggi sebesar 73% sedangkan yang memiliki persentase terendah adalah BRI Syariah

sebesar 49%. Desy Retma, Ahmad Juanda dan Waluya Jati (2015) melakukan penelitian pada tahun 2015-2016 yang menghasilkan pengungkapan indeks ISR pada 11 bank syariah hanya 9 bank syariah yang dikatakan baik, yakni sebesar 77% secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Apriliand, Afandi dan Nur Wahyu Ningsih (2019) dengan mengangkat judul Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) Terhadap Reputasi Perusahaan dengan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana mendapatkan hasil bahwa variabel ICSR selama periode pengamatan penelitian terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap reputasi perusahaan. Kemudian Haris Fifta Putra mengangkat juga penelitian yang berjudul Analisis Pelaksanaan Dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) mendapatkan hasil bahwa analisis terhadap pengungkapan secara keseluruhan tidak ada satu pun bank sampel yang mampu mencapai angka absolut 100% atau pengungkapan secara penuh.

**Tabel 2.1**  
**Kajian Pustaka**

No	Penelitian (tahun)	Judul	Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1.	Suci Gus Ryanti Hasani. Skripsi (2020)	Analisis Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Perbankan Syariah Berdasarkan <i>Islamic Social Reporting Index</i>	Menggunakan variabel ISR sebagai tolak ukur pengungkapan	Peneliti terdahulu menggunakan sampel jenuh sedangkan penulis menggunakan <i>purposive sampling</i>	Tingkat pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Bank Umum Syariah secara keseluruhan yakni mencapai 67,98% (informatif)
2.	Dea Devita Sari. Skripsi (2018)	Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Syariah Di Indonesia	Pengungkapan menggunakan ISR	Penelitian ini meneliti dua negara sedangkan penulis	Profitabilitas, Leverage, dan Jumlah Dewan Pengawas Syariah tidak

		dan Malaysia Tahun 2014-2016		hanya berfokus pada Negara Indonesia	berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada bank syariah di Indonesia dan di Malaysia.
3.	Khusnul Fauziah, Prabowo Yudho J. Jurnal 2013	Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan <i>Islamic Social Reporting Indeks</i>	Tema pada item ISR	Peneliti menggunakan sampel pada 7 BUS sedangkan penulis hanya 4 BUS	Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki tingkat pengungkapan tertinggi sebesar 73% dan yang terendah adalah Panin Bank Syariah sebesar 41%.
4.	Merry Anggrahini. Artikel Ilmiah (2015)	Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan <i>Islamic Social Reporting Indeks</i>	Alat analisis	Peneliti hanya menggunakan 1 tahun penelitian sedangkan penulis 3 tahun penelitian	Bank Muamalat Indonesia memiliki persentase tinggi sebesar 73%, sedangkan yang memiliki persentase terendah adalah BRI Syariah sebesar 49%.
5.	Desy Retma Sawitri, Ahmad Juanda, A Waluya Jati. Jurnal 2015	Analisis Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Perbankan Syariah Indonesia Berdasarkan <i>Islamic Social Reporting</i>	Jenis data yang digunakan	Peneliti menggunakan Tahun penelitian 2015-2016 sedangkan penulis tahun 2017-2019	Pengungkapan Indeks ISR pada 11 bank syariah hanya 9 bank syariah dikatakan baik, yakni sebesar 77% secara keseluruhan,



		<i>Index</i>			
6	Aprilian Ahmad Afandi, Supaijo, Nur Wahyu Ningsih. Jurnal 2019	Pengaruh Islamic <i>Corporate Social Responsibility</i> (ICSR) Terhadap Reputasi Perusahaan	Pengumpulan data menggunakan laporan keuangan tahunan bank syariah	Peneliti menggunakan metode analisis regresi linier sederhana sedangkan penulis melakukan <i>scoring index ISR</i> pada Bank Umum Syariah	Variabel ICSR selama periode pengamatan peneliti terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap reputasi perusahaan.
7	Haris Fifta Putra. Jurnal 2014	Analisis Pelaksanaan Dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Pada Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan <i>Indeks Islamic Social Reporting</i> (ISR)	Dalam pengambilan sampel menggunakan kriteria Bank Umum Syariah yang menjadi pemenang di <i>Corporate Image Award</i>	Sub-item ISR. Perbedaan di tahun penelitian yaitu 2012-2013	Hasil analisis terhadap pengungkapan secara keseluruhan tidak ada satu pun bank sampel yang mampu mencapai angka absolut 100% atau pengungkapan secara penuh.

## B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel-variabel yang akan diteliti oleh peneliti dan sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis) dari penyusunan instrument penelitian. Teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang atau pendapat lain, tetapi teori yang benar-benar telah teruji kebenarannya.

Berikut ini adalah landasan teori yang di gunakan oleh penulis sebagai bahan untuk menjelaskan teori-teori terhadap variable yang diteliti oleh penulis.

### 1. Pengungkapan (*Disclosure*)

*Disclosure* merupakan pengungkapan yang artinya tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Jika dikaitkan dengan data, *disclosure* berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Dan apabila dikaitkan dengan informasi berarti *disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang diperlukan bagi seseorang yang membutuhkan suatu informasi tersebut. Sehingga informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Sawitri, 2017).

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) lebih menekankan pengungkapan informasi yang memadai sebagaimana dinyatakan dalam standar pelaporan ketiga bahwa pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai. Makna dari kata memadai juga diungkap dalam penelitian bahwa tingkat minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan tidak menyesatkan *stakeholder*. Sementara pengungkapan penuh menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan (Ery dan Sunyoto, 2012)

Pengungkapan laporan keuangan (*disclosure of financial satatement*) merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi sangat tergantung dari pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan (Dien dan Iftanul, 2016 hlm 103). Menurut Gunawan (2000) informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang

diharuskan oleh peraturan yang berlaku yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan.

Kualitas pengungkapan perusahaan yang diberikan melalui laporan keuangan mempengaruhi kualitas keputusan investasi (Susanto, 1992), semakin lengkap informasi yang tersaji dalam laporan keuangan, semakin baik pula kualitas keputusan yang di ambil oleh para investor. Scott (1997:92) menunjukkan dua manfaat pengungkapan penuh (*full disclosure*) yang dapat dicapai secara simultan. Pertama, pengungkapan memungkinkan investor membuat keputusan investasi lebih baik, dan Kedua pengungkapan meningkatkan kemampuan pasar modal untuk investasi langsung yang paling produktif. Pengungkapan tidak saja penting pada masa sekarang, tetapi akan menjadi semakin penting pada masa mendatang. (Bambang Subroto, 2014 hlm 2)

**a. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Menurut Cheng dan Christiawan (2011) dalam *Word Business Council for Sustainable Development* menjelaskan CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak secara etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat maupun masyarakat secara luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya.

**b. Tujuan Pengungkapan**

Saat ini sudah banyak perusahaan yang melaporkan laporan CSR nya, namun belum banyak *stakeholders* khususnya masyarakat umum, apa yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan yang tidak mempromosikan kegiatan CSR nya. Hal ini dikarenakan bahwa beberapa perusahaan hanya mempromosikan CSR nya dalam bentuk laporan CSR yang diinput kedalam websites perusahaan yang dalam hal ini tingkat komunikasi akan kegiatan CSR nya sangat rendah

dibandingkan perusahaan yang mempromosikan kegiatan CSR nya dengan menggunakan jasa media periklanan.

Tujuan perusahaan mengungkapkan aktifitas CSR dalam bentuk *Sustainable Report* yaitu untuk mendongkrak reputasi dan citra merek perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat melakukan pengurangan biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah atau gas industri. Pengungkapan melalui *Sustainability Report* akan memperbaiki hubungan perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait, terutama para stakeholders dan regulator. Bagi internal perusahaan, peningkatan produktivitas akan mudah dicapai, karena karyawan akan merasa diperhatikan dan dihargai. Pengungkapan *Sustainability Report* juga memberi peluang bagi suatu organisasi atau perusahaan dalam mendapatkan penghargaan, sehingga akan meningkatkan citra perusahaan di mata *stakeholdernya*. (Imam Syairozi, 2019 hlm 12-13)

### c. Manfaat Pengungkapan

Penerapan CSR di suatu organisasi atau perusahaan dapat mendatangkan manfaat di masa mendatang baik untuk internal maupun eksternal perusahaan. Walaupun awalnya perusahaan menganggap bahwa menerapkan dan melakukan aktivitas CSR adalah suatu yang membebankan perusahaan, namun akhirnya perusahaan sadar bahwa aktivitas CSR merupakan salah satu bentuk pelayanan dan juga *philanthropy* perusahaan untuk menjalin hubungan yang baik terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menurut Rusdianto (2013) menjelaskan bahwa aktivitas CSR memiliki fungsi strategis bagi perusahaan sebagai bagian dari manajemen risiko dalam katup pengaman sosial. Oleh karena dengan menjalankan CSR, perusahaan diharapkan tidak mencari keuntungan dalam jangka waktu pendek tetapi dapat berkontribusi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang. Adapun manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:

- 1) Membangun dan menjaga reputasi perusahaan
- 2) Meningkatkan citra perusahaan
- 3) Mengurangi risiko bisnis perusahaan
- 4) Melebarkan cakupan bisnis perusahaan
- 5) Mempertahankan posisi merk perusahaan
- 6) Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas
- 7) Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (capital)
- 8) Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis, dan
- 9) Mempermudah pengelolaan manajemen risiko

Selain mendapatkan manfaat dari perusahaan, dengan menerapkan aktivitas CSR dapat mendatangkan manfaat yang positif bagi masyarakat dan pemerintah, yaitu:

- 1) Manfaat bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan untuk berbagai sektor seperti pengadaan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat, sektor ketenagakerjaan seperti meningkatkan pelatihan atau *training* untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja masyarakat luas.

- 2) Manfaat bagi Pemerintah

Aktivitas dari CSR sendiri berhubungan dengan masalah yang ada diberbagai daerah seperti hal nya masalah pendidikan, kurangnya akses kesehatan bagi masyarakat sekitar, dan pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan orang banyak. Dengan adanya kerjasama dari kebijakan pemerintah dengan perusahaan atau organisasi yang menerapkan CSR, banyak masyarakat yang terbantu akan adanya pelaksanaan CSR di sekitar mereka. Berbagai manfaat-manfaat yang ada, perusahaan kini akan mudah mendapatkan *brand image* mereka. Kebijakan pemerintah yang ada juga mempermudah akses perusahaan dalam melakukan aktivitas CSR nya. (Imam Syairozi, 2019 hlm 14-15)

#### d. Pengungkapan Penelitian

Pengungkapan pada penelitian ini meliputi indikator *Islamic Social Reporting index* diantaranya:

- 1) *Finance and Investment* (Pendanaan dan Investasi)
- 2) *Products and Service* (Produk dan Jasa)
- 3) *Employee* (Karyawan)
- 4) *Society* (Masyarakat)
- 5) *Environment* (Lingkungan)
- 6) *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)

## 2. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

### a. Pengertian

*Corporate Social Responsibility* adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Konsep CSR dipopulerkan pada tahun 1953 dengan diterbitkan buku yang bertajuk "*Social Responsibilities of the Businessman*" karya Howard R. Bowen yang kemudian dikenal dengan Bapak CSR. Awal mula munculnya konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang dimaksud disini tidak terbatas pada perseroan terbatas, tetapi juga kegiatan usaha yang ada, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pada awal perkembangannya, pelaksanaan CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan (donasi atau *charity*), terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin disekitar korporasi beroperasi. CSR pada tataran ini hanya sekedar berbuat baik agar terlihat baik. Michael Hopkins berpendapat bahwa tugas perusahaan adalah mencari keuntungan. Oleh karena itu, CSR dengan model derma (donasi) tidak akan membantu perusahaan dalam mencapai keuntungan dan sudah menjadi rahasia umum hukum bisnis adalah memaksimalkan modal.

Menurut Beth Stephens, mencari keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan, namun hanya sebagai bisnis utamanya. Terlebihnya perusahaan harus memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tujuan perusahaan. Apabila direkdi perusahaan hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi kepentingan pemegang saham, maka kemungkinan besar bisnis akan cenderung menyimpang. Perusahaan akan melakukan eksploitasi terhadap buruh dan menekan konsumen serta rekanan bisnis. Untuk itu tujuan mencari keuntungan dari perusahaan harus diperluas juga kepada pemenuhan kepentingan *stakeholder*. Dari pemikiran ini lah banyak pihak yang mengarahkan korporasi untuk melakukan CSR sebagai tindakan yang diatur oleh hukum.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau yang lebih dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial menurut Lord Holme dan Richard Watt adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan yang berjalan secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka dan juga komunitas lokal serta masyarakat luas (Novariant, 2017). Sedangkan Menurut Jhonatan Sofian CSR merupakan sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para stakeholder (karyawan (buruh), kostumer, masyarakat, komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat) dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan (Marthin, 2017).

Menurut Philip Kotler, CSR dikatakan sebagai *discretionary* yang dalam arti luas berarti sesuatu yang perlu dilakukan. Seandainya tidak dilakukan akan berakibat merugikan diri sendiri. Namun, hal ini bukanlah suatu peraturan yang diharuskan. Menurut *World Business Council for Sustainable Development*, CSR bukan sekedar *discretionary*, tetapi suatu komitmen yang merupakan kebutuhan bagi

perusahaan yang baik sebagai perbaikan kualitas hidup. (Nurdizal, 2011 hlm 15)

Dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, tanggung jawab sosial dan lingkungan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Rama, 2014). Sedangkan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, didalam asas-asasnya disebutkan mengenai asas akuntabilitas, yaitu didalam penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Disebutkan juga mengenai asas keberlanjutan yaitu mengenai penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Ada juga mengenai asas berwawasan lingkungan yaitu investor harus memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup (Marthin, 2017)

**b. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility***

*Corporate Social Responsibility* berkaitan dengan cara suatu bisnis bertindak terhadap kelompok dan pribadi lainnya dalam lingkungan sosialnya. Kelompok-kelompok dan individu tersebut disebut sebagai pihak pemercaya dalam organisasi (*organizational stakeholders*). Pihak pemercaya dalam organisasi yaitu kelompok, orang dan organisasi yang langsung dipengaruhi praktik-praktik suatu organisasi sehingga berkepentingan terhadap organisasi tersebut (Indra dan Imron, 2014)

**c. Konsep *Corporate Social Responsibility***

Menurut Archie Carrol dapat dipilah dalam empat kategori tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:



**1) Tanggung jawab ekonomi** (*economic responsibilities*)

*Pricing*, sebagai aktivitas ekonomi akan bersinegri dengan tanggungjawab sosial jika disadari pada itikad untuk memberikan harga yang memihak kepada konsumen. Artinya, harga yang diberikan merupakan representasi dari kualitas dan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang ditawarkan. Proses komunikasi melalui media iklan tidak bersifat menipu atau membohongi konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh guna mensinkronkan fungsi ekonomi dengan aktivitas tanggung jawab sosial.

**2) Tanggung jawab hukum** (*legal responsibilities*)

Tanggung jawab hukum oleh korporat merupakan kodifikasi sejumlah nilai dan etika yang dicanangkan korporat terhadap seluruh pembuat dan pemilik hukum yang terkait. Sudah seharusnya korporat menjalankan kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku.

**3) Tanggung jawab etis** (*ethical responsibilities*)

Tanggung jawab etis bertujuan untuk memenuhi standar, norma dan pengharapan dari stakeholder terhadap korporat termasuk dalam tanggung jawab etis adalah kepekaan korporat dalam menjunjung kearifan dan adat lokal pengenalan terhadap kebiasaan, tempat sakral, opinion leader, kebudayaan, bahasa daerah, kepercayaan dan tradisi menjadi sebuah kemutlakan guna menjalankan tanggung jawab etis korporat.

**4) Tanggung jawab filantropis** (*philanthropic responsibilities*)

Tanggung jawab ini didasari dari itikad korporat untuk berkontribusi pada perbaikan komunitas secara mikro maupun makro sosial. Tanggung jawab filantropis merupakan wujud konkret berupa pembangunan fisik yang dilakukan korporat terhadap komunitas.

#### d. *Corporate Social Responsibility* dalam Islam

Islam adalah suatu pandangan/cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk tanggung jawab sosial (Adiwarman, 2014 hlm 14). Tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah merupakan perkara asing. Tanggung jawab sosial sudah mulai ada dan di praktikan sejak 14 abad silam. Pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sangat sering disebut dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis (Yasir Yusuf, 2017). Dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah, Ayat 265:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari rida Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Secara jelas ayat ini mengungkapkan bahwa penting dari hasil usaha untuk sebagian dinafkahkan di jalan Allah, jika dikaitkan dengan konteks perusahaan maka dalam hal ini perusahaan perlu untuk ikut andil dalam upaya untuk membantu mensejahterakan perekonomian sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (Ferry Khusnul, 2019).

Menurut Chapra di dalam Islam, kegiatan usaha tidak hanya diasumsikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan material tetapi juga harus dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab agama. Ibrahim

2000, dalam Kamla 2007 mengatakan bahwa menggabungkan ajaran Islam dan Syariah ke dalam kebijakan perusahaan dan praktek memerlukan keterlibatan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang sempurna, tujuan utama dalam kaitannya yaitu mencakup penetapan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai bentuk ketaatan kepada perintah-perintah Allah (Isnawati).

Kajian lebih spesifik mengenai konsep CSR dalam Islam telah dilakukan oleh Jawed Akhtar Mohammed (2007) kajian tersebut dilakukan untuk mendalami falsafah Islam terhadap CSR. Jawed menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dalam Islam dibangun atas empat dasar, yaitu tauhid, keadilan, bebas berkehendak, dan bertanggung jawab. Kajian yang hampir sama juga dilakukan oleh Asyraf Wajdi Dusuki (2008). Beliau mendesain konsep dasar CSR adalah konsep khalifah paradigma takwa. Konsep khalifah bermakna bahwa perusahaan sebagai institusi bisnis bertugas sebagai pemegang kuasa Allah SWT untuk menjalankan bisnis sesuai dengan perintah Allah SWT. Di samping perusahaan berusaha meraih keuntungan untuk pemegang saham tetapi juga menjaga dan mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat, menaungi isu-isu kerja sama yang baik, keselamatan kerja, sumbangan kebijakan, bermanfaat secara sosial, dan menjauhi aktivitas berbahaya. Hal ini dilakukan untuk mencari keridhaan dari Allah SWT.

Menurut Muhammad Djakfar, Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur untuk menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal yaitu:

1) *Al-Adl*

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan kewajiban terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis.

Dalam beraktifitas didunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis. Islam juga melarang segala bentuk penipuan, *gharar* (spekulasi), *najsyi* (iklan palsu), *ihtikar* (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain

## 2) *Al-Ihsan*

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT.

Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Ihsan adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada stakeholders.

## 3) Manfaat

Pada dasarnya, perbankan telah memberikan manfaat terkait operasional yang bergerak dalam bidang jasa yaitu jasa penyimpanan, pembiayaan dan produk atau fasilitas lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Konsep manfaat dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR), lebih dari aktifitas ekonomi. Bank syariah sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis misalnya terkait bentuk *philanthropi* dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal dan pelestarian lingkungan.

## 4) Amanah

Perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), harus memahami dan menjaga amanah dari

masyarakat yang secara otomatis terbebani di pundaknya. Amanah dalam perbankan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran gaji, pembayaran karyawan, dll.

Dalam perspektif Islam, kebijakan perusahaan dalam mengemban tanggung jawab sosial (CSR) terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan yaitu:

- a) Tanggung Jawab Sosial (CSR) terhadap para pelaku dalam perusahaan dan stakeholder.
- b) Tanggung Jawab Sosial (CSR) terhadap lingkungan alam
- c) Tanggung Jawab Sosial (CSR) terhadap kesejahteraan sosial secara umum

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggungjawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada.

Sebuah perusahaan mengemban tanggungjawab sosial dalam tiga domain:

### **1) Pelaku-pelaku Organisasi, meliputi:**

#### **a) Hubungan perusahaan dengan pekerja**

##### **(1) Keputusan Perekrutan, Promosi, dll bagi pekerja**

Islam mendorong kita untuk memperlakukan setiap muslim secara adil. Sebagai contoh dalam perekrutan, promosi dan keputusan-keputusan lain dimana seorang manajer harus menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran dan keadilan adalah sebuah keharusan.

## **(2) Upah yang adil**

Dalam organisasi Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun juga majikan. Pada hari pembalasan, Rasulullah SAW akan menjadi saksi terhadap orang yang mempekerjakan buruh dan mendapatkan pekerjaannya diselesaikan olehnya namun tidak memberikan upah kepadanya.

## **(3) Penghargaan terhadap keyakinan pekerja**

Prinsip umum tauhid atau keesaan berlaku untuk sebuah aspek hubungan antara perusahaan dan pekerjaannya. Pengusaha muslim tidak boleh memperlakukan pekerjaannya seolah-olah Islam tidak berlaku selama waktu kerja. Sebagai contoh, pekerja muslim harus diberi waktu untuk mengerjakan shalat, tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan moral Islam, harus diberi waktu istirahat bila mereka sakit dan tidak dapat bekerja, dan lain-lain. Untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan, keyakinan para pekerja non-muslim juga harus dihargai.

## **(4) Hak Pribadi**

Jika seorang pekerja memiliki masalah fisik yang membuatnya tidak dapat mengerjakan tugas tertentu atau jika seorang pekerja telah berbuat kesalahan di masa lalu, sang majikan tidak boleh menyiarkan berita tersebut.

### **b) Hubungan Pekerja dengan Perusahaan**

Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan perusahaan, terutama berkaitan dengan persoalan kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Dengan demikian seorang pekerja tidak boleh menggelapkan uang perusahaan dan juga tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada orang luar. Praktek tidak etis lain terjadi

jika para manajer menambahkan harga palsu untuk makanan dan pelayanan dalam pembukuan keuangan perusahaan mereka. Beberapa dari mereka melakukan penipuan karena merasa dibayar rendah dan ingin mendapatkan upah yang adil. Pada saat yang lain, hal ini dilakukan hanya karena ketamakan. Bagi para pekerja muslim,

### c) Hubungan perusahaan dan Pelaku Usaha Lain

#### (1) Distributor

Berkaitan dengan distributor, etika bisnis menyatakan bahwa seseorang harus melakukan negosiasi dengan harga yang adil dan tidak mengambil keuntungan berdasarkan bagian atau kekuasaan yang lebih besar. Untuk menghindari kesalahpahaman dimasa depan, Allah SWT telah memerintahkan kita untuk membuat perjanjian kewajiban bisnis secara tertulis.

#### (2) Pembeli atau konsumen

Pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberi tau bila terdapat kekurangan pada suatu barang. Islam melarang praktek-praktek dibawah ini ketika berhubungan dengan konsumen atau pembeli:

- (a) Penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat
- (b) Penimbunan dan manipulasi harga
- (c) Penjualan barang palsu atau rusak
- (d) Bersumpah palsu untuk mendukung sebuah penjualan
- (e) Membeli barang curian
- (f) Larangan mengambil bunga atau riba

#### (3) Pesaing

Meskipun negara negara barat menyatakan diri sebagai kawasan berdasarkan prinsip persaingan pasar, publikasi bisnis utama akan memperlihatkan bahwa sebuah

bisnis akan berusaha memenangkan dirinya dan mengeliminasi para pesaingnya. Sebuah perusahaan selanjutnya akan dapat memperoleh hasil ekonomi di atas rata-rata melalui praktek-praktek penimbunan dan monopoli harga.

## **2) Lingkungan Alam**

Kaum muslim selalu didorong untuk menghargai alam, Bahkan, Allah SWT telah menunjuk keindahan alam sebagai salah satu dari tanda-tanda Nya. Islam menekankan peran manusia atas lingkungan alam dengan membuatnya bertanggung jawab terhadap lingkungan sekelilingnya sebagai khalifah Allah SWT. Dalam perannya sebagai khalifah, seorang pengusaha Muslim, diharapkan memelihara lingkungan alamnya. Kecenderungan mutakhir paham environmentalisme bisnis, dimana sebuah usaha secara proaktif memberi perhatian sangat cermat dalam memperhatikan lingkungan, sebenarnya bukan merupakan suatu yang baru. Sejumlah contoh semakin meperjelas betapa pentingnya hubungan Islam dengan lingkungan alam, perlakuan terdadaap binatang, polusi lingkungan dan hak-hak kepemilikan, dan polusi lingkungan terhadap sumber-sumber alam bebas seperti misalnya udara dan air.

## **3) Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungan alam sekelilingnya, kaum muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberikan perhatian kepada kesejahteraan umum masyarakat dimana mereka tinggal. Sebagai bagian masyarakat, pengusaha muslim harus turut memperhatikan kesejahteraan anggotanya yang miskin dan lemah. Bisnis muslim harus memberi perhatian kepada usaha-usaha amal dan mendukung berbagai tindakan kedermawanan (Dermawati, 2014).



**e. Manfaat dari *Corporate Social Responsibility***

Wibisono dalam Fauziah menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya:

- 1) Bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan CSR akan memperoleh empat manfaat, yaitu: (1) keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas, (2) perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*), (3) perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas dan (4) perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).
- 2) Bagi masyarakat. Praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.
- 3) Bagi lingkungan. Praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya.
- 4) Bagi Negara. Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut "*corporate misconduct*" atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

Dalam memberikan manfaat, perusahaan perlu memiliki prioritas dan strategi. Salah satu prioritas penting adalah eksistensi perusahaan itu sendiri untuk menjadi lembaga bisnis berkelanjutan.

Hal ini tentunya akan menjadi tujuan yang strategis (Nurdizal, 2011 hlm 15)

### 3. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan).

Secara lengkap kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dijabarkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sejalan dengan itu, Bank juga menerapkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Komitmen untuk menjalankan kegiatan CSR yang mendukung implementasi keuangan berkelanjutan tertuang dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang disusun Bank.

Sedangkan, Machmud (2009:9) mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al Qur'an dan hadits Nabi SAW.

## a. Sejarah Bank Syariah

### 1) Berdirinya Bank Syariah di Dunia

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah, misalnya Aznwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi (1961).

Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat Internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal, yaitu:

- a) Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba, sedikit atau banyak hukumnya haram.
- b) Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
- c) Menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Pembentukan bank syariah semula memang banyak diragukan sebab:

- a) Banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah suatu yang tidak mungkin dan tidak lazim.
- b) Adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di lain pihak bank islam adalah salah satu alternative sistem ekonomi islam.

Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk

bank syariah. Hal tersebut tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk bank syariah, misalnya “*Islamic windows*” di Malaysia, “*the Islamic transactions*” di cabang Bank Mesir, “*the Islamic services*” di cabang-cabang bank perdagangan Arab Saudi. Sementara itu, Citibank mendirikan *citi Islamic Investment Bank*. Secara umum sejarah berdirinya bank syariah di dunia dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**

**Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia 1940-1980**

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1940</b>	Rintisan bank syariah di Malaysia, untuk mengelola dana Jemaah haji secara nonkonvensional
<b>1963</b>	Berdirinya Mit Graham Rural Bank, di Mesir oleh Dr. Ahmad Najjar
<b>1967</b>	Mit Graham ditutup karena alasan politis dan diambil alih oleh National Bank of Egypt
<b>1969</b>	Muncul gagasan kolektif pembentukan bank syariah pada konvensi Negara-negara Islam sedunia di Malaysia
<b>1970</b>	Delegasi Mesir mengajukan proposal pendirian bank syariah pada sidang menteri luar negeri Negara-negara OKI di Karachi
<b>1972</b>	Berdiri kembali sistem bank tanpa bunga yang bersifat sosial di Mesir, yaitu Nasser Social Bank
<b>Maret 1972</b>	Usulan/proposal Delegasi Mesir di agendakan kembali dan memutuskan membentuk komisi khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan
<b>Juli 1973</b>	Para ahli yang mewakili Negara islam penghasil minyak membicarakan pendirian bank syariah dan terumuskanlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

**2) Berdirinya Bank Syariah di Indonesia**

Umat Islam Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariat K.H. Mas Mansur,

ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa Bank Konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai sendiri bank yang bebas riba. Kemudian disusul dengan ide untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia yang sebenarnya sudah muncul di pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dengan seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini:

- a) Operasi Bank Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku yakni UU No 14/1967
- b) Konsep Bank Syariah dari segi politis berkonotasi Ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
- c) Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia (Andrianto, 2019 hlm 12).

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di tandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendiri ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar.

Pada awal pendirian Bank Mmuamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan

hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil” tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh. Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syariah, BSM menjalin kerja sama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi (Syafi'i Antonio, 2001 hlm 25).

**Tabel 2.3**  
**Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 1983-2008**

Tahun	Keterangan
<b>1983</b>	Diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus)
<b>1988</b>	Pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru termasuk bank syariah
<b>1991</b>	Berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
<b>1998</b>	Lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai Bank Umum Syariah (BUS) atau dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS)
<b>16 Desember 2003</b>	Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank
<b>16 Juli 2008</b>	Telah diberlakukannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
<b>Oktober 2009</b>	Telah berdiri 6 BUS dan 25 UUS dengan total asset sebesar Rp.59,68 triliun

Dalam beberapa hal sesungguhnya Bank Syariah memiliki sejumlah persamaan dengan Bank Konvensional, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan lain sebagainya namun demikian banyak juga perbedaan mendasar diantara keduanya. M. Syafi'i Antonio mencatat sejumlah perbedaan, diantaranya:

- a) Akad. Dalam Bank Syariah aka dang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi*, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sehingga memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti
- b) Lembaga Penyelesaian Sengketa. Jika terdapat pendapatan atau perselisihan antara bank dengan nasabah, kedua belah pihak

tidak menyelesaikan di pengadilan negeri, tetapi sesuai tata cara hukum materi syariah dikenal dengan Badan Arbitrasi Muamalah Indonesia

- c) Dewan Pengawas Syariah (DPS). Unsur yang membedakan adalah keharusan adanya DPS yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya sesuai dengan garis-garis syariah.
- d) Bisnis dan Usaha yang Dibiayai. Dalam Bank Syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah, karena itu Bank Syariah tidak mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.
- e) Lingkungan kerja dan *Corporate Culture*. Etika, Cara Berpakaian, Tingkah Laku mencerminkan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam (Arif Effendi, 2014).

#### **b. Fungsi Bank Syariah**

Menurut Muhammad, 2005:195-196 dalam paradigma akuntansi Islam bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Manajemen Investasi. Bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi resiko penyedia dana (shahibul maal), sementara bank tidak ikut menanggungnya.
- 2) Investasi. Bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Rekening investasi dapat dibagi menjadi tidak



terbatas (*unrestricted* mudharabah) atau terbatas (*restricted* mudharabah).

- 3) Jasa-jasa keuangan. Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- 4) Jasa sosial. Konsep bank syariah mengharuskan bank tersebut melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana pinjaman kebijakan (*qardh*), zakat, atau dana sosial yang sesuai yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

CSR selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Aktivitas CSR di perbankan syariah pada dasarnya telah melekat secara inheren sebagai konsekuensi kebersandaran bank syariah pada ajaran Islam. Berbeda dengan bank konvensional tidak bisa dipisahkan secara dikotomis antara orientasi bisnis seharusnya juga membawa orientasi sosial, atau setidaknya tidak kontradiksi dengan orientasi sosial. Hal ini membawa konsekuensi pada kuatnya karakter sosial dari perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas sosialnya, relative jika dibandingkan dengan bank konvensional (Muslihati, 2018)

Bank umum syariah di Indonesia terutama yang telah memiliki cakupan bisnis yang luas, telah menerapkan program CSR dalam operasionalnya. Sebagai institusi yang berpedoman pada ketentuan syar'i dalam melakukan aktivitas bisnisnya, bank umum syariah dituntut untuk memiliki kepedulian yang besar terhadap masyarakat sekitar sekaligus menyadari bahwa hubungan baik yang dibangun

bersama masyarakat juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian bisnis (Antonio, 2001:4)

#### 4. *Islamic Social Reporting (ISR)*

Sejalan makin meningkatnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam dunia bisnis, maka semakin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial atau yang sering disebut dengan *social reporting*. Adanya konsep tanggungjawab sosial dalam Islam maka meningkatkan pula keinginan untuk membuat pelaporan ataupun pengungkapan sosial yang bersifat syariah. Salah satu cara untuk menilai pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah yaitu dengan menggunakan indeks *Islamic Social Reporting (ISR)*.

*Islamic Social Reporting (ISR)* merupakan salah satu cara untuk menilai pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan secara syariah. Menurut Haniffa, ISR adalah perpanjangan pelaporan social yang meliputi tidak hanya harapan dewan pengurus atas pandangan masyarakat terhadap peran perasaan dalam ekonomi tetapi juga pemenuhan perspektif spiritual untuk pengguna laporan yang muslim (Merina, 2016). Maliah et.al menekankan bahwa ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif islam, yaitu pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*sosial accountabilitas*) (Rahayu, 2019 hlm 43).

Menurut Othman et.al. 2009, Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh satu entitas Islam (Sofyani, Ulum et.al 2012 hlm 38)

Berikut adalah enam kriteria pengungkapan dalam kerangka indeks ISR yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Pendanaan dan Investasi (*Finance and Investment*)

1) Riba (*interest-free*)

*Riba* berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Al-Ziyadah*), berkembang (*An-Nuwuw*), meningkat (*Al-Irtifa'*), dan membesar (*Al-'uluw*). Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

2) *Gharar* (ketidakpastian)

Terjadi ketika terdapat *incomplete information* antara kedua pihak yang bertransaksi dalam hal kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Salah satu contoh dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah transaksi *lease and purchase* (sewa-beli) karena adanya ketidakpastian dalam akad yang diikrarkan antara kedua pihak.

3) Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim atas harta benda yang dimiliki ketika telah mencapai nisab. Zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan dan *shadaqah*. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang di zakatkan, batasan harta yang dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, cara perhitungannya dan siapa yang boleh menerima harta zakat sesuai apa yang diatur oleh Allah SWT.

4) Kewajiban atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih

Penanggungan atau penghapusan utang harus dilakukan dengan adanya penyelidikan terlebih dahulu kepada pihak debitur terkait ketidak mampuannya dalam pembayaran piutang. Penanguhan atau penghapusan utang merupakan suatu bentuk sikap tolong-menolong yang dianjurkan di dalam Islam.

b. Investasi dan Pembiayaan

Menurut Haniffa dan Hudaib (2007) aspek lain yang perlu diungkapkan adalah jenis investasi yang dilakukan oleh bank syariah

dan proyek pembiayaan yang dijalankan. Aspek ini cukup diungkapkan secara umum.

c. Produk dan Jasa (*Products and Services*)

1) Status kehalalan produk

Pentingnya status kehalalan suatu produk merupakan suatu kewajiban yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya kepada seluruh konsumen muslim yang notabennya masyarakat Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam.

2) Jenis dan definisi setiap produk

Akad-akad dalam bank syariah menggunakan istilah-istilah yang asing bagi masyarakat, sehingga perlu informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami.

3) Pelayanan atas keluhan konsumen/nasabah

Suatu perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada produk yang dihasilkan (*product-oriented*) melainkan memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan (*customer-oriented*) dengan menyediakan pusat layanan keluhan konsumen setelah proses jual beli

d. Karyawan (*Employee*)

Menurut Othman dan Thani (2010) memaparkan bahwa masyarakat Islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik perusahaan, jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak, dan lingkungan kerja.

e. Masyarakat (*Society*)

Item-item pengungkapan dalam kriteria masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sodaqoh*/donasi, *wakaf*, *qard hassan*, sukarela dari pihak karyawan, pemberian beasiswa, pemberdayaan kerja bagi siswa yang lulus sekolah/kuliah berupa

magang atau praktek kerja lapangan, pengembangan dalam kepemudaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal/bantuan/kegiatan sosial lain, dan mensponsori berbagai macam kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama. Hanifah (2002), menerangkan bahwa konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah*, amanah, dan *adl*. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan meringankan beban orang lain dengan hal-hal yang telah disebutkan pada item-item pengungkapan. Perusahaan memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat.

f. Lingkungan (*Environment*)

Bagi seluruh makhluk hidup untuk melindungi lingkungan sekitarnya, konsep yang mendasari tema lingkungan dalam penelitian ini adalah *mizan*, *I'tidal*, *khhilafah* dan *akhirah*. Konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, informasi-informasi yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya dan program-program yang digunakan untuk melindungi lingkungan harus di ungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan (Citra dan Verawaty, 2016)

g. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

*Corporate Governance* bagi perbankan syariah memiliki cakupan yang lebih luas, karena memiliki kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang khas yaitu hukum syariat dan harapan kaum muslim. Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, laporan kinerja direksi, DPS dan komisaris, kebijakan remunerasi direksi, DPS dan komisaris, laporan

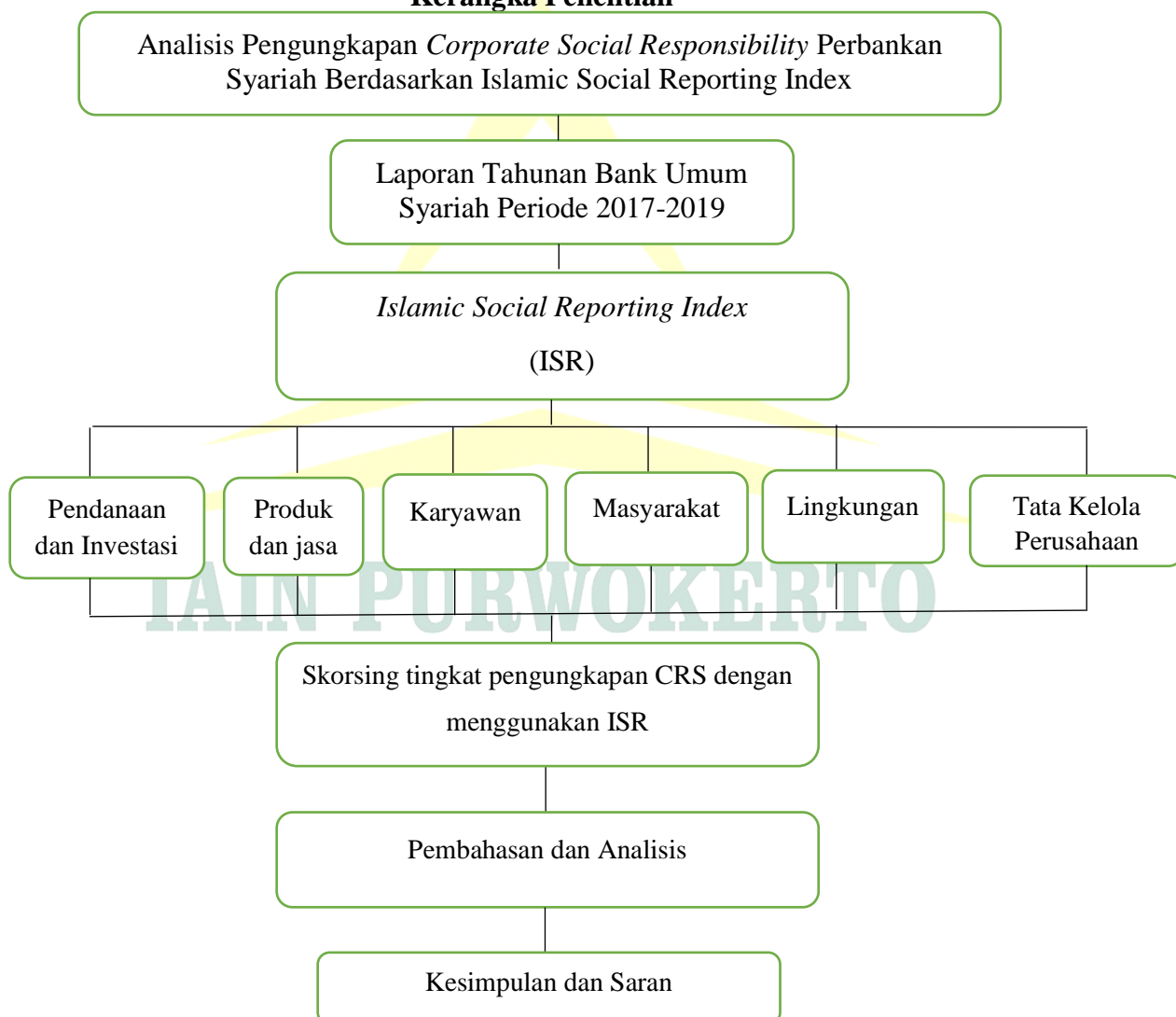
pendapatan dan penggunaan dana non halal, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi dan anti terorisme.

### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori di atas, penulis ingin menjelaskan tingkat pengungkapan CSR pada Bank Umum Syariah pada tahun 2017-2019 dengan melihat dari laporan pada tahun masing-masing bank yang diteliti oleh penulis, yang kemudian diberi skorsing terhadap pengungkapan yang sudah tertera pada item-item ISR. Berikut visualisasi kerangka penelitian.

**Gambar 2.1**

#### **Kerangka Penelitian**



Salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja sosial BUS adalah melalui Laporan Tahunan (*Annual Report*). Informasi kinerja sosial BUS yang diungkapkan dalam laporan tahunan dianalisis dengan indeks ISR untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengungkapan kinerja sosial yang diungkapkan. Dari hasil analisis tersebut didapatkan hasil tingkat pengungkapan kinerja sosial BUS berdasarkan Indeks ISR.

Demikian penjelasan Bab II yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Pembahasan Bab II dibagi kedalam tiga pembahasan yaitu landasan teori, kajian pustaka dan kerangka penelitian. Pembahasan landasan teori

#### **D. Landasan Teologis**

Teologi berasal dari kata *theos* dan *logos*. *Theos* berarti Tuhan, Allah, sedangkan *logos* berarti ilmu, wacana. Dengan kata lain, bahwa teologi merupakan ilmu yang membahas tentang Allah, atau juga bisa diartikan sebagai doktrin-doktrin atau keyakinan-keyakinan tentang Allah (atau para dewa) dari kelompok keagamaan tertentu atau dari para pemikir perorangan. Teologi Islam merupakan suatu disiplin ilmu yang membicarakan persoalan kepercayaan manusia terhadap Tuhannya dengan bukti-bukti yang logis.

Bambang Wahyutomo mengatakan bahwa tanggung jawab sosial pelaku usaha adalah komitmen dan kemampuan dunia usaha untuk melaksanakan hak dan kewajiban sosial terhadap lingkungan sosialnya sebagai kerangka menciptakan masyarakat peduli (*Caring Society*) dan kemitraan (Rahayu, 2010). Dalam Q.S Al-Maidah: 1 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janjimu.”

Ayat ini menunjukkan bahwa akad dalam segala bentuk dan maknanya wajib ditepati. Rasa aman dan kebahagiaan manusia akan terpenuhi, bila mereka memenuhi ikatan perjanjian yang mereka jalin.

Sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajiban memenuhi akad, walaupun hal tersebut merugikan. Karena jika dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan (M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 2004)

Secara universal, manusia adalah makhluk Allah yang memiliki potensi kemakhlukan yang paling bagus, mulia, pandai, dan cerdas. Manusia mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan dan mengembangkan titah-titah amanatNya serta memperoleh kasih sayangNya yang sempurna. Sebagai wujud kesempurnaannya, manusia diciptakan oleh Allah setidaknya memiliki dua tugas dan tanggungjawab besar. Pertama sebagai seorang hamba yang berkewajiban untuk memperbanyak ibadah kepadaNya sebagai bentuk tanggung jawab *'ubudiyah* terhadap Tuhan yang telah menciptakannya. Kedua, sebagai khalifah yang memiliki jabatan *ilahiyah* sebagai pengganti Allah dalam mengurus seluruh alam. Dengan kata lain, manusia sebagai *khalifah* berkewajiban untuk menciptakan kedamaian, melakukan perbaikan, dan tidak membuat kerusakan, baik untuk dirinya maupun untuk makhluk yang lain.

Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, yaitu: Abdullah bin Umar RA berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “ketahuilah kalian semua adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawabannya tentang keluarga yang dipimpinnya. Istri adalah pemelihara rumah suami dan anak-anaknya. Budak adalah pemelihara harya tuannya dan ia bertanggung jawab mengenai hal itu. Maka camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dituntut (dimintai pertanggungjawaban) tentang hal yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari)



Islam adalah agama yang mengedepankan kepentingan nilai-nilai sosial di masyarakat ketimbang hanya sekedar mengedepankan wajah kita ke barat dan ke timur dalam shalat. Dalam Q.S Al-Baqarah: 177 yang berbunyi

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ  
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ  
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Ayat ini mencakup sendi-sendi yang agung, kaidah-kaidah umum, dan aqidah yang lurus. Penafsiran ini adalah ketika pertama kali Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin menghadap Baitul Maqdis dan kemudian mengalihkan ke Ka'bah, sebagian Ahlul Kitab dan kaum muslimin merasa keberatan. Maka Allah SWT memberikan penjelasan mengenai hikmah pengalihan kiblat tersebut, yaitu bahwa ketaatan kepada Allah SWT, patuh semua perintah-Nya, menghadap kemana saja yang diperintahkan, dan mengikuti apa yang telah disyariatkan, ini disebut kebaikan, ketakwaan dan keimanan yang sempurna.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana dalam pendekatan ini proses analisis data yang dikerjakan pada umumnya ditunjukkan untuk menggambarkan kejadian atau hubungan variabel yang diamati. Studi deskriptif pada dasarnya tidak memerlukan pengujian lebih lanjut (Teguh, 2015).

Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode angka indeks. Metode angka indeks digunakan untuk mengetahui perkembangan keadaan secara menyeluruh dari variabel atau kejadian yang diamati.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Dimensi waktu pada penelitian ini yaitu menggunakan data *time series*. Yang mana data ini dikumpulkan dari waktu ke waktu seperti data harian, mingguan, bulanan, atau tahunan untuk menggambarkan perkembangan objek tersebut. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah laporan tahunan bank umum syariah periode 2017-2019.

#### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu (Sugiyono, 2019).

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia serta telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode penelitian yang terdiri dari 14 BUS.

## 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2019).

Sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perbankan syariah yang telah berbentuk Bank Umum Syariah pada periode 2017-2019
- b. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2017-2019
- c. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan pada tahun 2017-2019
- d. Bank Umum Syariah yang menjadi pemenang penghargaan *Corporate Image Award* 2017-2019

**Tabel 3.1**

### **Daftar BUS yang Memenuhi Kriteria Penentuan Sampel**

<b>No.</b>	<b>Nama Bank</b>	<b>Data</b>
1	Bank Muamalat	<i>Annual Report</i>
2	Bank Syariah Mandiri	<i>Annual Report</i>
3	Bank BRI Syariah	<i>Annual Report</i>
4	Bank BNI Syariah	<i>Annual Report</i>

#### D. Variabel dan Indikator Penelitian

Pada penelitian ini terdapat indikator penelitian diantaranya:

1. *Finance and Investment* (Pendanaan dan Investasi)
2. *Products and Services* (Produk dan Jasa)
3. *Employee* (Karyawan)
4. *Society* (Masyarakat)
5. *Environment* (Lingkungan)
6. *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)

Kemudian indikator ini diturunkan menjadi 53 item yang akan dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Item Pengungkapan dalam ISR**

NO	ITEM PENGUNGKAPAN ISR	SKOR	SUMBER
<b>A</b>	<b>Pendanaan Dan Investasi</b>		
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan)	1	Haniffa (2002) Othman dkk (2009)
2	Kegiatan yang mengandung Gharar (hedging, future on delivery trading/margin trading, arbitrage baikspot maupun forward, short selling, pure swap, warrant)	1	Haniffa (2002) Othman dkk (2009)
3	Zakat (jumlah, dan penyaluran)	1	Othman dkk (2009)
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih)	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
5	Kegiatan investasi (secara umum)	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
6	Proyek pembiayaan (secara umum)	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
<b>B</b>	<b>Produk Dan Jasa</b>		
7	Penyertaan DPS terhadap kehalalan produk dan jasa baru	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
8	Jenis dan definisi setiap produk	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
<b>C</b>	<b>Karyawan</b>		
10	Jumlah karyawan	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
11	Jam Kerja	1	Haniffa (2002)

			Othman dkk (2009)
12	Hari libur	1	Haniffa (2002) Othman dkk (2009)
13	Tunjangan karyawan	1	Haniffa (2002) Othman dkk (2009)
14	Kebijakan remunerasi	1	Othman dkk (2009)
15	Pendidikan dan pelatihan karyawan	1	Haniffa (2002) Othman dkk (2009)
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	1	Othman dkk (2009)
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1	Othman dkk (2009)
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	1	Othman dkk (2009)
20	Tempat ibadah yang memadai	1	Othman dkk (2009)
21	Waktu ibadah/kegiatan religious	1	Othman dkk (2009)
22	Kesejahteraan karyawan	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
<b>D</b>	<b>Masyarakat</b>		
23	Sedekah/Donasi (Jumlah dan penyalurannya)	1	Haniffa (2002) Othman dkk (2009)
24	Wakaf (Jenis dan penyaluran)	1	Haniffa (2002)
25	Qard Hasan/pinjaman kebajikan (Jumlah dan penyaluran)	1	Haniffa (2002)
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	1	Othman dkk (2009)
27	Pemberian beasiswa sekolah	1	Othman dkk (2009)
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	1	Othman dkk (2009)
29	Pengembangan generasi muda	1	Othman dkk (2009)
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	1	Othman dkk (2009)
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	Othman dkk

			(2009)
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur, dll)	1	Haniffa dan Hudaib (2007) Othman dkk (2009)
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan, dan keagamaan)	1	Othman dkk (2009)
<b>E</b>	<b>Lingkungan</b>		
34	Konservasi lingkungan hidup	1	Haniffa (2002) Othman dkk (2009)
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan airbersih, dll)	1	Othman dkk (2009)
36	Pendidikan terhadap lingkungan hidup	1	Othman dkk (2009)
37	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
38	Sistem manajemen lingkungan hidup	1	Othman dkk (2009)
<b>F</b>	<b>Tata Kelola Perusahaan</b>		
39	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1	Othman dkk (2009)
40	Pendapatan dan penggunaan dana non- halal	1	SEBI No. 12/13/D PbS (2010)
41	Struktur kepemilikan saham	1	Othman dkk (2009)
42	Kebijakan anti korupsi	1	Othman dkk (2009)
43	Kebijakan anti penyaluran dana kegiatan anti terorisme	1	UU No. 8 Tahun 2010
44	Perkara hokum	1	Othman dkk (2009)
45	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	Othman dkk (2009)
46	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	Othman dkk (2009)
47	Remunerasi dewan komisaris	1	Othman dkk (2009)
48	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	Othman dkk (2009)
49	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	Othman dkk (2009)

50	Remunerasi dewan direksi	1	Othman dkk (2009)
51	Rincian nama dan profil DPS	1	Othman dkk (2009)
52	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	Othman dkk (2009)
53	Remunerasi DPS	1	Othman dkk (2009)
	<b>TOTAL</b>	53	

## E. Pengumpulan Data Penilitain

### Teknik Pegumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literature, buku, referensi, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek pembahasan, misalnya mengkaji penelitian terdahulu berupa Jurnal, Skripsi, Tesis dan lainnya berkaitan dengan objek penelitian.

#### 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan melalui buku-buku, peraturan-peraturan, serta laporan relevan yang ada pada objek penelitian. Data yang diperoleh berbentuk data sekunder yaitu terdapat pada laporan tahunan yang telah diaudit dari bank yang menjadi objek penelitian selama periode 2017-2019. Laporan tahunan tersebut diperoleh peneliti melalui webside resmi masing-masing bank yang menjadi objek penelitian.

## F. Analisis Data Penelitian

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini mengenai analisis pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perbankan syariah Indonesia berdasarkan *Islamic Social Reporting index* dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai informasi yang terdapat dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah di indonesia sesuai dengan item-item ISR yang digunakan.

2. Melakukan penilaian (scoring) indeks ISR pada Bank Umum Syariah. Masing – masing item pengungkapan memiliki nilai 1 atau 0. Nilai 1 akan diberikan apabila item pada ISR terdapat dalam data Bank Umum Syariah dan nilai 0 akan diberikan apabila sebaliknya. Nilai-nilai tersebut kemudian dijumlahkan baik menurut masing-masing tema maupun secara keseluruhan (Anggrahini, 2015).
3. Selanjutnya dilakukan analisis konten terhadap tiap-tiap tema indeks ISR pada setiap Bank Umum Syariah untuk mengetahui tingkat pengungkapan CSR Bank Syariah. Kemudian dilakukan penilaian secara kumulatif indeks ISR pada Bank Umum Syariah (BUS) yang akan menentukan tingkat pengungkapan CSR Bank Umum Syariah (BUS). Untuk memudahkan dalam mengetahui seberapa besar tingkat pengungkapan CSR di Bank Umum Syariah akan digunakan pendekatan Rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks ISR} : \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan}}{\text{jumlah item maksimal}} \times 100\%$$

4. Menentukan predikat tingkat pengungkapan CSR dari masing-masing BUS. Dalam penilaian tingkat pengungkapan kinerja sosial BUS, akan digunakan pendekatan yang mengacu dimana skor pengungkapan diklasifikasikan dalam 4 kategori: Sangat Informatif (81-100), Informatif (66-80), Kurang Informatif (51-66) dan tidak informatif (0-50).
5. Kemudian, menganalisis dan mengidentifikasi aspek *Islamic Social Reporting* yang sudah dan belum diungkapkan (Qulub,dkk 2019 hlm 67).



## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Temuan Hasil Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Bank Syariah

Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah merupakan badan usaha yang setara dengan bank konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, bank umum syariah dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa.

Persamaan mendasar dari bank syariah dan bank konvensional adalah sama-sama merupakan lembaga intermediasi keuangan. Syafi'i Antonio (2001) menjelaskan bahwa pada sisi teknis, bank syariah dan bank konvensional memiliki beberapa persamaan, yakni dalam teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum yang digunakan dalam pembiayaan dan sebagainya. Bank syariah dan bank konvensional merupakan organisasi yang sama-sama bertujuan mencari keuntungan, hanya saja pada bank syariah melarang adanya riba atau aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Bank syariah pertama kali muncul pada tahun 1963 sebagai *pilot project* dalam bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil Mit Gharm, Mesir. Percobaan berikutnya terjadi di Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk bank koperasi. Setelah itu gerakan bank syariah mulai hidup kembali pada pertengahan tahun 1970-an. Berdirinya *Islamic Development Bank* pada 20 Oktober 1975, yang merupakan lembaga keuangan internasional Islam multilateral, mengawali periode ini dengan memicu bermunculnya bank syariah penuh di berbagai negara, seperti *Dubai Islamic Bank* di Dubai (Maret 1975), *Faisal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan (1977), dan *Kuwait Finance House* di Kuwait (1977). Sampai

saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah beroperasi di 70 negara muslim dan non muslim yang total portofolionya sekitar \$200 milyar.

Di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang non produktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan alam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.

Pada awal masa operasinya, bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Namun demikian, perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan undang-undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menguatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS).

## **B. Hasil Analisis Penelitian**

### **1. Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Kinerja Sosial) berdasarkan setiap Bank Umum Syariah**

#### **a. Bank Muamalat Indonesia**

Bank Muamalat Indonesia didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada 27 Oktober 1994, BMI memperoleh izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hingga saat ini, Bank Muamalat telah memiliki 276 kantor layanan diantaranya yaitu 1 kantor pusat, 83 kantor cabang, 150 kantor cabang pembantu, 43 kantor kas, dan 1 kantor luar negeri yang berada di Malaysia. Operasional bank didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 95 unit Mobil Kas Keliling serta jaringan ATM di Malaysia melalui *Malaysia Electronic Payment* (MEPS).

Sepanjang tahun 2017, Bank Muamalat telah merealisasikan berbagai program yang terdiri dari tanggung jawab sosial perusahaan bidang lingkungan hidup, tanggung jawab sosial perusahaan bidang pemberdayaan sosial kemasyarakatan, tanggung jawab sosial perusahaan bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap produk dan jasa serta konsumen. Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 11.428.140.160. Realisasi biaya tersebut terdiri dari Dana Zakat Karyawan/Bank sebesar Rp 9.371.486.027. Dana Infak sebesar Rp 279.355.207, dan Dana Non ZIS sebesar Rp 1.777.298.926.

Di tahun 2018, Bank Muamalat merealisasikan berbagai program yang terdiri dari ekonomi, pendidikan, dan kemanusiaan. Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 11,37 miliar. Adapun detail realisasi penyaluran dana tersebut terdiri dari dana *social trust fund* sebesar 130.577.815. Dana sekolah prestasi Muamalat sebesar Rp 3.170.725.000. Dana aksi tanggap Muamalat sebesar Rp 3.038.264.066. Dana Bantuan Infrastruktur sebesar 3.883.566.000. Dana santunan tunai Muamalat sebesar 1.053.699.896, dan dana untuk lain-lain sebesar 88.733.600.

Kemudian di tahun 2019 Bank Muamalat Indonesia mengalokasikan anggaran khusus untuk menjalankan kegiatan-kegiatan CSR. Besaran anggaran CSR sendiri terdiri atas gabungan antara zakat perusahaan dan zakat karyawan, serta berasal dari dana kebajikan/non-halal. Berikut adalah anggaran CSR pada 2019 yang dijalankan oleh Baitulmaal Muamalat sebagai pengelola zakat dan dana kebajikan Bank Muamalat Indonesia. Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 11.429.745.051. Realisasi biaya tersebut terdiri dari pendidikan Rp 3.052.354.885, kemanusiaan Rp 3.769.426.000, kesehatan Rp 115.330.000, ekonomi Rp 1.852.453.441, dan dakwah advokasi Rp 2.640.180.725.

**Tabel 4.1 Indeks ISR Bank Muamalat**

NO	INDIKATOR	PERSENTASE			
		2017	2018	2019	TOTAL
1	Pendanaan dan Investasi	83,33%	83,33%	83,33%	83,33%
2	Produk dan Jasa	100%	66,67%	66,67%	77,78%
3	Karyawan	69,23%	61,53%	84,61%	71,79%
4	Masyarakat	54,55%	72,73%	72,73%	66,67%
5	Lingkungan	40%	80%	60%	60%
6	Tata Kelola Perusahaan	100%	100%	100%	100%

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, secara keseluruhan pada tahun 2017 hingga 2019 Bank Muamalat Indonesia mendapatkan nilai

sebesar 76,59%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Bank Muamalat dengan menggunakan ISR mendapatkan predikat Informatif dan relatif meningkat setiap tahun untuk setiap tema nya.

**b. Bank Syariah Mandiri**

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, merupakan berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis. Pemerintah mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah. Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Hingga saat ini Mandiri Syariah memiliki 1 kantor pusat dan 1.343 jaringan kantor yang terdiri dari 129 kantor cabang, 389 kantor cabang pembantu, 53 kantor kas dan jaringan kantor lainnya seperti 114 payment point, 50 kantor layanan gadai, 7 mikro dan 600 layanan syariah bank di seluruh propinsi di Indonesia.

Sepanjang tahun 2017 pelaksanaan program CSR Bank Syariah Mandiri memiliki 2 (dua) sumber dana, yakni dana Zakat Infak Sadaqah (ZIS) dan dana Kebajikan/Sosial. Dana zakat yang bersumber dari zakat perusahaan, zakat dari nasabah umum serta zakat pegawai bank. Bank Syariah Mandiri menyalurkan dana sebesar Rp 26,03 miliar. Sedangkan Dana Kebajikan bersumber dari denda, pendapatan non halal dan dana sosial lainnya sebesar Rp 49,61 miliar.

Tahun 2018 Bank Syariah Mandiri menyalurkan zakat melalui Laznaz BSM sebesar Rp 27,75 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dan penerimaan dana kebajikan per 31 Desember 2018 sebesar 23,97 miliar. Jenis bantuan/kegiatan yang telah mendapat penyaluran dana sosial/kebajikan meliputi pembangunan sarana ibadah, pembelian atau pembangunan sarana dan prasarana bidang pendidikan, bantuan kebencanaan, beasiswa, kegiatan keagamaan, dan lain-lain.

Kemudian di tahun 2019 Bank Mandiri Syariah menyalurkan zakat melalui lembaga zakat BSM sebesar Rp 36,850 miliar. Sedangkan Laznas BSM Umat telah menyalurkan dana pada mustahik sebesar 22,61 miliar. Di samping itu juga, Bank Syariah Mandiri juga menganggarkan biaya ketenagakerjaan untuk pengembangan kompetensi pegawai. Realisasi biaya pendidikan dan pelatihan sebesar Rp 78.940 miliar.

**Tabel 4.2 Indeks ISR Bank Syariah Mandiri**

NO	INDIKATOR	PERSENTASE			
		2017	2018	2019	TOTAL
1	Pendanaan dan Investasi	66,67%	66,67%	83,33%	79,58%
2	Produk dan Jasa	100%	100%	100%	100%
3	Karyawan	69,23%	84,61%	84,61%	79,48%
4	Masyarakat	81,82%	90,91%	71,73%	81,48%
5	Lingkungan	60%	40%	40%	46,67%
6	Tata Kelola Perusahaan	93%	100%	100%	97,67%

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, secara keseluruhan pada tahun 2017 hingga 2019 Bank Syariah Mandiri mendapatkan nilai sebesar 79,58%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan ISR mendapatkan predikat Informatif.

### c. Bank BRI Syariah

BRI Syariah adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 1969, dahulu bernama Bank Jasa Arta, lalu diakuisisi oleh Bank Rakyat Indonesia pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRI syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRI Syariah.

Hingga tahun 2019 BRI Syariah memiliki karyawan sejumlah 5.932 dan 2.503 kantor diantaranya yaitu 57 kantor cabang, 215 kantor cabang pembantu, 10 kantor kas, 12 unit mikro syariah dan 2.209 kantor layanan syariah.

Pada tahun 2017 BRI Syariah merealisasikan beberapa program dengan total biaya yang dikeluarkan 2.308.390.575. Realisasi biaya tersebut terdiri dari faedah pendidikan sebesar 1.119.350.000. Faedah kesehatan sebesar 94.500.000. Faedah sosial 802.956.580. Faedah peribadahan sebesar 115.374.995. Faedah lingkungan hidup sebesar 67.159.000 dan faedah pemberdayaan ekonomi sebesar 109.050.000.

Di tahun 2018 realisasi beragam kegiatan CSR BRI Syariah Berfaedah membutuhkan pengembangan kemasyarakatan sebesar Rp 5.027.540.418 untuk tahun 2018, meningkat dari nilai di tahun sebelumnya. Realisasi biaya tersebut terdiri dari faedah pendidikan sebesar 1.170.426.068. Faedah kesehatan sebesar 649.470.330. Faedah sosial sebesar 2.527.377.732. Faedah peribadahan sebesar 492.161.288. Faedah lingkungan hidup sebesar 51.105.000 dan faedah pemberdayaan ekonomi sebesar 137.000.000.

Kemudian di tahun 2019 realisasi kegiatan CSR BRI Syariah Berfaedah mencatat total investasi pengembangan kemasyarakatan sebesar Rp 3.145.926.062. Realisasi biaya tersebut terdiri dari faedah pendidikan sebesar 662.596.000. Faedah kesehatan sebesar 117.596.100. Faedah sosial 1.353.494.944. Faedah peribadahan

sebesar 992.239.018. Faedah lingkungan hidup sebesar 20.000.000 dan faedah pemberdayaan ekonomi sebesar 25.831.000.

**Tabel 4.3 Indeks ISR Bank BRI Syariah**

NO	INDIKATOR	PERSENTASE			
		2017	2018	2019	TOTAL
1	Pendanaan dan Investasi	50%	83,33%	83,33%	72,22%
2	Produk dan Jasa	100%	100%	100%	100%
3	Karyawan	46,15%	76,92%	61,53%	61,53%
4	Masyarakat	81,82%	100%	90,91%	90,91%
5	Lingkungan	40%	80%	60%	60%
6	Tata Kelola Perusahaan	66,67%	100%	87%	84,55%

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, secara keseluruhan pada tahun 2017 hingga 2019 Bank BRI Syariah mendapatkan nilai sebesar 78,20%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Bank BRI Syariah dengan menggunakan ISR mendapatkan predikat sangat informatif.

#### **d. Bank BNI Syariah**

Bank BNI Syariah mulai berdiri dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 pada tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran



terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Hingga tahun 2019 BNI Syariah memiliki 300 kantor diantaranya yaitu 67 kantor cabang, 165 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 8 kantor fungsional, 20 payment point. Kemudian terdapat 22 mobil layanan gerak, 202 mesin ATM BNI dan 1500 outlet.

Pengelolaan aktivitas CSR BNI Syariah dilakukan bekerja sama dengan Yayasan Hasanah Titik (YHT). YHT merupakan sebuah lembaga sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang mempunyai afiliasi dengan pengelolaan infaq dan shodaqoh BNI Syariah. YHT sendiri didirikan oleh perseorangan yang menduduki jabatan di BNI Syariah. Namun, untuk menjaga independensi dan nilai-nilai profesionalitas, YHT dikelola oleh SDM yang mempunyai kapabilitas dan serta kapasitas di bidangnya. Untuk menjalankan program kerjanya, YHT memiliki anggaran yang diperoleh dari zakat, infaq dan shodaqoh di lingkungan BNI Syariah, baik yang berasal dari perusahaan maupun dari pegawai.

Tahun 2017 BNI Syariah telah menetapkan 4 (empat) pilar yang menjadi landasan pokok kegiatan CSR, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan dan lingkungan, bidang sosial dan dakwah. Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 11.759.666.263. Detail realisasi tersebut terdiri dari dana ekonomi sebesar 3.411.514.700, dana pendidikan sebesar Rp 1.589.517.050, dana sosial sebesar Rp 4.465.056.571, dana dakwah sebesar Rp 1.565.899.942, dana kesehatan sebesar Rp 727.678.000.

Tahun 2018, BNI Syariah masih berprogram sesuai pilar-pilar sebelumnya yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, sosial dakwah dan tanggap bencana. Pengembangan program tersebut ditetapkan dengan pokok-pokok yang diprioritaskan yaitu: *Kebutuhan Dasar* (santunan, bantuan biaya pendidikan dan kesehatan), *Middle up program* (pendidikan dan *upgrading*), *Exit Program* (program

pemberdayaan). YHT merekapitulasi dana sejumlah Rp 24.195.226.181 dengan rincian sebagai berikut: Zakat Pegawai sebesar Rp 10.190.573.678, Zakat Perusahaan sebesar Rp 10.396.102.330, Amilin sebesar Rp 2.351.053.109, Infak Rp 700.134.141, Infak FTD sebesar Rp 325.865.153, Dana Kebajikan sebesar Rp 81.580.614, HKC sebesar Rp 59.400.000, dan Wakaf sebesar Rp 90.517.156

Selanjutnya tahun 2019 penyaluran dana yang dikeluarkan dengan total 26.310.209.064 dari berbagai program yang terdiri dari: bidang pendidikan sebesar Rp 6.469.095.625, bidang kesehatan Rp 1.990.793.474, bidang kemanusiaan Rp 13.142.252.307, bidang ekonomi sebesar Rp 348.400.000, dan bidang dakwah sebesar Rp 4.359.667.658.

**Tabel 4.4 Indeks ISR Bank BNI Syariah**

NO	INDIKATOR	PERSENTASE			
		2017	2018	2019	TOTAL
1	Pendanaan dan Investasi	66,67%	83,33%	83,33%	77,77%
2	Produk dan Jasa	100%	100%	100%	100%
3	Karyawan	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%
4	Masyarakat	81,82%	81,82%	81,82%	81,82%
5	Lingkungan	60%	80%	80%	73,33%
6	Tata Kelola Perusahaan	100%	100%	100%	100%

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, secara keseluruhan pada tahun 2017 hingga 2019 Bank BNI Syariah mendapatkan nilai sebesar 84,97%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Bank BRI Syaiah dengan menggunakan ISR mendapatkan predikat Sangat Informatif.

## **2. Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Kinerja Sosial) Berdasarkan Indikator ISR**

Pada tingkat pengungkapan CSR telah dilakukan analisis dari perhitungan indeks ISR pada 4 BUS dari tahun 2017 sampai 2019. Analisis yang dilakukan kepada setiap indikator ISR di tiap-tiap BUS.

Indikator pengungkapan Indeks ISR yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 6 indikator: indikator pendanaan dan investasi, indikator produk dan jasa, indikator karyawan, indikator masyarakat, indikator lingkungan dan indikator tata kelola perusahaan. Dari setiap indikator terdiri dari beberapa sub-tema. Seluruh sub-tema dari masing-masing indikator dalam penelitian ini berjumlah 53 sub-tema. Penentuan tingkat pengungkapan corporate social responsibility pada setiap indikator berdasarkan ketentuan predikat kinerja sosial.

**a. Indikator Pendanaan dan Investasi (*Finance and Investment*)**

Penilaian kuantitatif pada indikator pendanaan dan investasi Bank Umum Syariah dalam penelitian ini dilakukan dengan penilaian terhadap 6 sub-tema pengungkapan. Sub-tema ini terdiri dari aktivitas mengandung riba, aktivitas mengandung gharar, rincian laporan pengelolaan zakat, kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih, kegiatan investasi, dan proyek pembangunan. Berikut ini tabel presentase tingkat pengungkapan indeks ISR indikator pendanaan dan investasi pada Bank Umum Syariah.

**Tabel 4.5 Indikator Pendanaan dan Investasi**

No	NAMA BANK	PERSENTASE		
		2017	2018	2019
1	BANK MUAMALAT	83,33%	83,33%	83,33%
2	BANK SYARIAH MANDIRI	66,67%	66,67%	83,33%
3	BANK BRI SYARIAH	50%	83,33%	83,33%
4	BANK BNI SYARIAH	66,67%	83,33%	83,33%

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis pada indikator pendanaan dan investasi di atas, menunjukkan bahwa angka tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia dengan total nilai secara keseluruhan sebesar 83,33% sehingga meraih predikat sangat informatif. Sedangkan nilai terendah terdapat pada bank BRI Syariah dengan rata-rata nilai secara keseluruhan sebesar 72% sehingga mendapatkan predikat informatif.

namun secara rata-rata keempat BUS meraih predikat informatif, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran BUS terhadap pelaporan pendanaannya baik.

**b. Indikator Produk dan Jasa (*Product and Service*)**

Penilaian kuantitatif pada indikator produk dan jasa dalam penelitian ini dilakukan dengan penilaian 3 sub-tema pengungkapan. Pengungkapan pada indikator ini terdiri dari 3 sub-tema yaitu persetujuan dari DPS terhadap produk dan jasa baru yang digunakan, jenis dan definisi dari semua produk dan jasa yang digunakan, dan layanan atas keluhan terhadap nasabah. Berikut presentase tingkat pengungkapan indeks ISR indikator produk dan jasa pada Bank Umum Syariah pada tahun 2017-2019

**Tabel 4.6 Indikator Produk dan Jasa**

No	NAMA BANK	PERSENTASE		
		2017	2018	2019
1	BANK MUAMALAT	100%	66,667%	66,67%
2	BANK SYARIAH MANDIRI	100%	100%	100%
3	BANK BRI SYARIAH	100%	100%	100%
4	BANK BNI SYARIAH	100%	100%	100%

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis untuk indikator produk dan jasa menunjukkan bahwa, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah mendapatkan skor 100% dengan predikat sangat informatif, sedangkan Bank Muamalat hanya 78% yang artinya memiliki nilai terendah dan dengan predikat informatif. Sub tema yang tidak di ungkapkan dalam Bank Muamalat adalah pernyataan DPS terhadap kehalalan produk dan jasa baru.

**c. Indikator Karyawan (*Employess*)**

Penilaian kuantitatif pada indikator Karyawan dalam penelitian ini dilakukan dengan penilaian terhadap 13 sub-tema pengungkapan. Sub-tema pada karyawan yaitu, jumlah karyawan, jumlah jam kerja karyawan, jumlah hari libur karyawan, biaya tunjangan karyawan,

biaya kesejahteraan karyawan, kebijakan remunerasi, pendidikan dan pelatihan karyawan, kesamaan peluang bagi seluruh karyawan, apresiasi terhadap karyawan berprestasi, kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, keterlibatan karyawan di perusahaan, tempat ibadah yang memadai dan waktu ibadah atau kegiatan keagamaan. Berikut adalah hasil presentase analisis tingkat pengungkapan indeks ISR indikator karyawan.

**Tabel 4.7 Indikator Karyawan**

No	NAMA BANK	PERSENTASE		
		2017	2018	2019
1	BANK MUAMALAT	69,23%	61,53%	84,61
2	BANK SYARIAH MANDIRI	69,23%	84,61%	84,61%
3	BANK BRI SYARIAH	46,15%	76,92%	61,53%
4	BANK BNI SYARIAH	76,92%	76,92%	76,92%

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat bahwa untuk indikator karyawan, skor tertinggi diraih oleh Bank Syariah Mandiri dengan nilai secara keseluruhan sebesar 79,48% mendapatkan predikat informatif. sedangkan untuk nilai terendah terdapat pada Bank BRI Syariah dengan rata-rata secara keseluruhan mendapatkan nilai 61,53% sehingga mendapatkan predikat kurang informatif. secara keseluruhan BUS mengungkapkan indikator karyawan secara informatif, hal ini menunjukkan bahwa BUS melindungi karyawannya.

#### **d. Indikator Masyarakat (*Society*)**

Penilaian kuantitatif pada indikator masyarakat dalam analisis penelitian ini dilakukan dengan penilaian terhadap 11 sub-tema pengungkapan. Sub-tema pada indikator masyarakat yaitu donasi atau sedekah, wakaf, *qardh hasan* atau pinjaman kebajikan, sukarelawan dari kalangan karyawan, beasiswa, pemberdayaan kepada lulusan sekolah atau magang, pengembangan generasi muda, peningkatan hidup masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal atau sosial, dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan sosial.

Berikut adalah persentase hasil analisis pengungkapan indeks ISR indikator masyarakat.

**Tabel 4.8 Indikator Masyarakat**

No	NAMA BANK	PERSENTASE		
		2017	2018	2019
1	BANK MUAMALAT	54,55%	72,73%	72,73%
2	BANK SYARIAH MANDIRI	81,82%	90,91%	71,73%
3	BANK BRI SYARIAH	81,82%	100%	90,91
4	BANK BNI SYARIAH	81,82%	81,82%	81,82%

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis pada indikator masyarakat, menunjukkan bahwa skor tertinggi diraih oleh Bank BRI Syariah dengan nilai skor rata-rata 90,91% sehingga mendapatkan predikat sangat informatif. Sedangkan untuk skor terendah terdapat pada Bank Muamalat dengan skor 66,67% dengan predikat informatif. Secara keseluruhan untuk indikator masyarakat BUS mendapatkan predikat informatif. Hal ini menunjukkan bahwa BUS sadar akan masyarakat sekitar.

**e. Indikator Lingkungan (*Environment*)**

Penilaian kuantitatif pada indikator lingkungan dalam penelitian ini dilakukan dengan penilaian terhadap 5 sub-tema pengungkapan. Sub-tema yang digunakan dalam penelitian ini adalah konservasi lingkungan hidup, kebijakan mengurangi polusi, pendidikan lingkungan hidup, penghargaan dibidang lingkungan hidup dan sistem manajemen lingkungan hidup. Berikut adalah presentase hasil analisis pengungkapan indeks ISR indikator lingkungan.

**Tabel 4.9 Indikator Lingkungan**

No	NAMA BANK	PERSENTASE		
		2017	2018	2019
1	BANK MUAMALAT	40%	80%	60%
2	BANK SYARIAH MANDIRI	60%	40%	40%
3	BANK BRI SYARIAH	40%	80%	60%
4	BANK BNI SYARIAH	60%	80%	80%

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis untuk indikator lingkungan di atas, bisa dilihat bahwa nilai tertinggi terdapat pada Bank BNI Syariah dengan nilai 73% sehingga mendapatkan predikat informatif. Sedangkan skor terendah terdapat ada Bank Syariah Mandiri dengan nilai 47% dengan predikat tidak informatif. Secara keseluruhan untuk indikator lingkungan hidup mendapatkan predikat kurang informatif.

**f. Indikator Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)**

Penilaian kuantitatif pada indikator tata kelola perusahaan dalam penelitian ini dilakukan dengan penilaian terhadap 15 sub-tema pengungkapan. Sub-tema tersebut terdiri dari status kepatuhan operasional terhadap syariah, pendapatan dan penggunaan dana sosial, nama profil komisaris, kinerja komisaris, remunerasi komisaris, nama dan profil DPS, laporan kinerja DPS, remunerasi DPS, nama dan profil direksi, kinerja direksi, remunerasi direksi, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi, laporan perkara hukum dan kebijakan anti terorisme. Berikut adalah hasil persentase pengungkapan indeks ISR indikator tata kelola perusahaan.

**Tabel 4.10 Indikator Tata Kelola Perusahaan**

No	NAMA BANK	PERSENTASE		
		2017	2018	2019
1	BANK MUAMALAT	100%	100%	100%
2	BANK SYARIAH MANDIRI	93%	100%	100%
3	BANK BRI SYARIAH	66,67%	100%	87%
4	BANK BNI SYARIAH	100%	100%	100%

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis di atas, untuk indikator tata kelola perusahaan skor tertinggi terdapat pada Bank Muamalat dan Bank BNI Syariah dengan skor 100%. Sedangkan untuk skor terendah terdapat pada Bank BRI Syariah dengan nilai 84,56% mendapatkan predikat sangat informatif. Secara keseluruhan BUS mengungkapkan indikator tata kelola perusahaan dengan sangat informatif.

### C. Interpretasi Hasil

#### 1. Perbandingan tingkat CSR Perbankan Syariah berdasarkan Indikator Indeks ISR pada tahun 2017-2019

**Tabel 4.11 Pengungkapan CSR Bank Syariah Berdasarkan Indikator Indeks ISR**

No	Indikator Pengungkapan	2017	2018	2019
1	Pendanaan dan Investasi	66,67%	79,16%	83,33%
2	Produk dan Jasa	100%	91,67%	91,67%
3	Karyawan	65,38%	74,99%	75,91%
4	Masyarakat	75%	86,36%	79,29%
5	Lingkungan	50%	70%	60%
6	Tata Kelola Perusahaan	89,91%	100%	96,75%

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Secara keseluruhan dari hasil perhitungan pengungkapan CSR berdasarkan indikator indeks ISR tahun 2017-2019 tertinggi adalah indikator tata kelola perusahaan dengan angka 95,55%. Sedangkan angka terendah pada pengungkapan CSR indikator indeks ISR 2017-2019 adalah indikator lingkungan dengan angka rata-rata 60% yang diungkapkan oleh bank syariah.

#### 2. Tingkat *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah Berdasarkan Indeks ISR Tahun 2017-2019

**Tabel 4.12 Tingkat CSR Bank Umum Syariah Berdasarkan Indeks ISR Tahun 2017-2019**

No	Nama Bank Syariah	2017		2018		2019	
		Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai
1	Bank Muamalat	40	75,47%	42	79,24%	44	83,01%
2	Bank Syariah Mandiri	42	79,24%	45	84,90%	44	83,01%
3	BRI Syariah	33	62,26%	48	90,56%	41	77,35%
4	BNI Syariah	44	83,01	46	86,79%	46	86,79%

Sumber: data sekunder diolah, 2019



**Tabel 4.13 Tingkat Predikat Pengungkapan Bank Umum Syariah Pada Tahun 2017-2019**

No	Nama Bank	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Bank Muamalat	Informatif	Informatif	Sangat Informatif
2	Bank Syariah Mandiri	Informatif	Sangat Informatif	Sangat Informatif
3	BRI Syariah	Kurang Informatif	Sangat Informatif	Informatif
4	BNI Syariah	Sangat Informatif	Sangat Informatif	Sangat Informatif

Sumber: data sekunder diolah, 2019

Nilai indeks ISR Bank Muamalat pada tahun 2017 menunjukkan angka 40 (empat puluh) poin dari 53 (lima puluh tiga) poin indeks ISR atau sebesar 75,47% dengan predikat informatif. Predikat informatif di tahun 2017 karena pada indikator masyarakat hanya mengungkapkan 6 (enam) dari 11 (sebelas) sub-tema yaitu sedekah, qard hasan, pemberian beasiswa sekolah, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal atau sosial dan menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan. Tahun 2018, nilai indeks Bank Muamalat meningkat 2 (dua) poin menjadi 42 (empat puluh dua) poin atau sebesar 79,24% dengan predikat tingkat pengungkapan yaitu informatif. Tahun 2018 mendapatkan predikat informatif karena Bank Muamalat pada indikator karyawan, hanya mengungkapkan 8 (delapan) dari 13 (tiga belas) sub-tema yaitu jumlah karyawan, tunjangan karyawan, kebijakan remunerasi, pendidikan dan pelatihan karyawan, kesamaan peluang bagi seluruh karyawan, kesehatan dan keselamatan karyawan, keterlibatan karyawan di perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Kemudian pada tahun 2019, nilai CSR Bank Muamalat bertambah 2 (dua) yaitu menjadi menjadi 44 (empat puluh empat) poin. Dengan nilai indeks ISR sebesar 83,01% dan predikat tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* adalah sangat informatif. Penambahan poin yang signifikan terdapat pada tema karyawan.

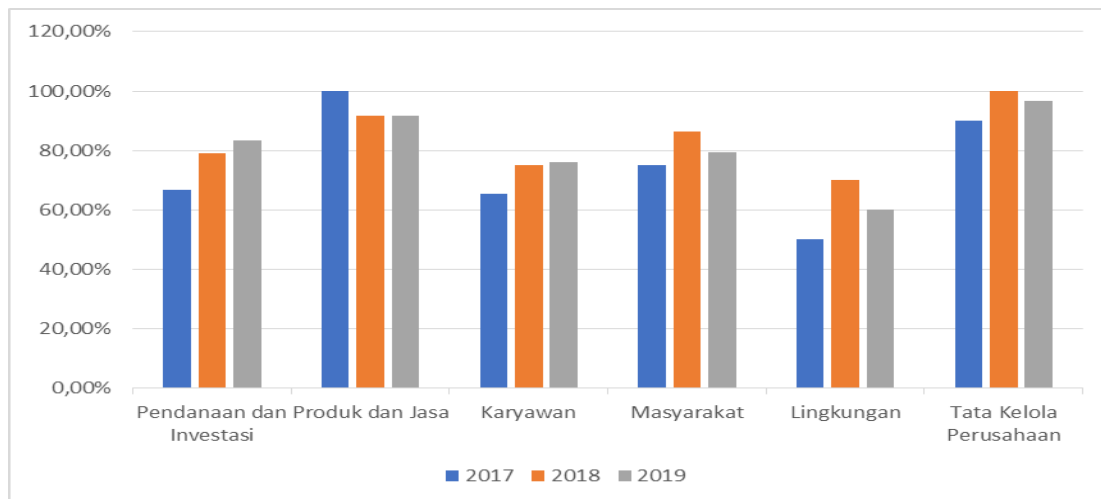
Nilai indeks ISR Bank Syariah Mandiri pada tahun 2017 menunjukkan nilai dengan angka 42 (empat puluh dua) poin sebesar 79,24%, dengan nilai tersebut Bank Syariah Mandiri mendapatkan predikat informatif. Tahun 2017 indikator karyawan mendapatkan nilai terendah dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019, yaitu hanya mengungkapkan 9 (sembilan) dari 13 (tiga belas) sub-tema karena tidak mengungkapkan jam kerja, hari libur, keterlibatan karyawan di perusahaan dan tempat ibadah yang memadai. Pada indikator tata kelola perusahaan tidak mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Kemudian pada tahun 2018 meningkat 3 (tiga) poin menjadi 45 (empat puluh lima) poin atau sebesar 84,90%. Dengan nilai tersebut maka predikat tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* adalah sangat informatif. Adanya peningkatan di tahun 2018 adalah pengungkapan pada indikator karyawan yang awalnya di tahun 2017 tidak diungkapkan yaitu sub-tema jam kerja dan hari libur. Dan pada tahun 2019 terjadi penurunan pada nilai indeks ISR sebesar 1 (satu) poin menjadi 44 (empat puluh empat) poin atau nilai indeks sebesar 83,01% dan mendapatkan predikat sangat informatif. Penurunan 1 (satu) poin disebabkan tidak diungkapkannya subtema dari tema masyarakat yaitu sukarela dari kalangan karyawan.

Nilai indeks ISR BRI Syariah pada tahun 2017 menunjukkan angka 33 (tiga puluh tiga) poin atau dengan nilai indeks ISR sebesar 62,26%. Dengan nilai tersebut maka predikat pengungkapan BRI Syariah tahun 2017 kurang informatif. Karena BRI Syariah hanya mengungkapkan sub-tema pada indikator karyawan sebanyak 6 (enam) dari 13 (tiga belas) sub-tema. Pada tahun 2018 BRI Syariah mengalami peningkatan yang sangat drastis dengan penambahan 15 (lima belas) poin menjadi 48 (empat puluh delapan) poin atau dengan nilai sebesar 90,56% dengan predikat sangat informatif. Peningkatan 15 (lima belas) poin ini diperoleh dari peningkatan indikator karyawan, masyarakat, lingkungan dan tata kelola perusahaan. Pada indikator karyawan BRI Syariah mengungkapkan subtema kebijakan remunerasi, kesamaan peluang bagi seluruh karyawan,

keterlibatan karyawan di perusahaan dan kegiatan ibadah. Pada indikator masyarakat, BRI Syariah mengungkapkan subtema pemberdayaan para lulusan sekolah/kuliah dan pengembangan generasi muda. Kemudian di indikator lingkungan, BRI Syariah melakukan pendidikan lingkungan hidup dan mendapat penghargaan dibidang lingkungan hidup. Pada indikator tata kelola perusahaan, BRI Syariah mengungkapkan status kepatuhan pada syariah, pendapatan dan penggunaan dana non halal, terdapat kinerja komisaris, kinerja direksi dan kinerja DPS. Kemudian tahun 2019 BRI Syariah mengalami penurunan 7 (tujuh) poin menjadi 41 (empat puluh satu) poin atau dengan nilai indeks sebesar 77,37% dan mendapat predikat pengungkapan *corporate social responsibility* yaitu informatif. Penurunan 7 (tujuh) poin ini disebabkan dari tidak diungkapkannya subtema dari 2 (dua) indikator yaitu karyawan dan tata kelola perusahaan. Pada indikator karyawan tidak melakukan pengungkapan apresiasi terhadap karyawan berprestasi dan tidak adanya kegiatan religius. Pada indikator tata kelola perusahaan BRI Syariah tidak mengungkapkan pendapatan dan penggunaan dana non halal, kinerja DPS, dan remunerasi DPS.

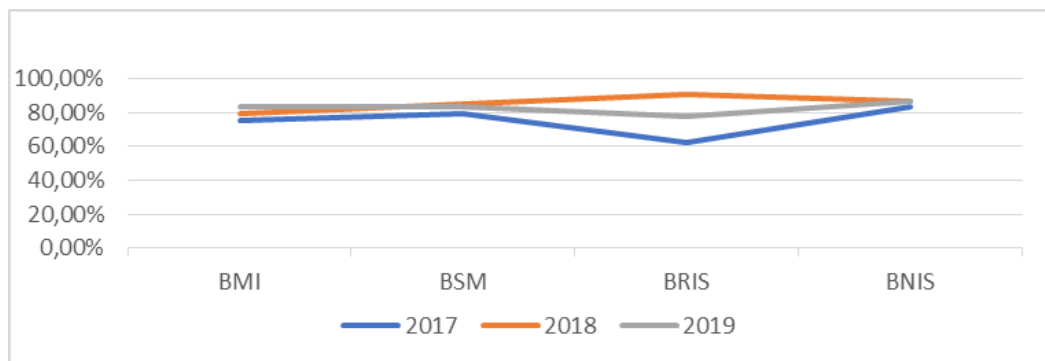
Nilai indeks ISR BNI Syariah pada tahun 2017 menunjukkan angka 44 (empat puluh empat) poin atau dengan nilai indeks ISR sebesar 83,01%. Dengan nilai tersebut maka predikat tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* BNI Syariah pada tahun 2017 sangat informatif. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan 2 (dua) poin atau dengan nilai indeks sebesar 86,79% maka predikat tingkat pengungkapan BNI Syariah tahun 2017-2019 adalah sangat informatif. Peningkatan dengan penambahan 2 (dua) poin ini diperoleh dari 2 (dua) indikator yaitu indikator pendanaan dan investasi, dan indikator lingkungan. Pada indikator pendanaan dan investasi telah diungkapkan kegiatan yang mengandung gharar dan pada indikator lingkungan telah diungkapkan sistem manajemen lingkungan hidup.

**Grafik 4.1 Tingkat CSR pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Indeks ISR Tahun 2017-2019**



Dari grafik diatas bahwa tingkat CSR berdasarkan indeks ISR pada Bank Umum Syariah, indikator tata kelola perusahaan merupakan indikator yang lebih dominan di banding indikator yang lain. Karena tata kelola perusahaan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak kepentingan (*stakeholders*). Tata kelola perusahaan juga diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya tata kelola yang baik maka perusahaan mampu menciptakan pertumbuhan sesuai target dan rencana. Tata kelola perusahaan yang baik juga dapat memberikan kesempatan perusahaan untuk menekankan nilai-nilai positif. Selain itu akan membuat perusahaan lebih bertanggungjawab, sehingga kebohongan dapat diminimalkan.

Grafik diatas juga menunjukkan bahwa pada indikator lingkungan menempati posisi terendah dikarenakan perbankan syariah hakikatnya tidak berdampak langsung terhadap ekosistem seperti halnya perusahaan pertambangan dan lain sebagainya. Karena perbankan syariah termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa.

**Grafik 4.2 Tingkat Pengungkapan CSR pada Bank Umum Syariah****Berdasarkan Indeks ISR Pada Tahun 2017-2019**

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR pada Bank Umum Syariah mengalami naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2017, Bank Umum Syariah yang telah baik dalam pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR sebanyak 3 (tiga) Bank Syariah, dan 1 (satu) Bank Syariah masih kurang baik yaitu BRI Syariah. Sedangkan pada tahun 2018 keempat Bank Syariah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan dianggap sudah baik pengungkapan CSR berdasarkan Indeks ISR. Bank Muamalat mengalami kenaikan sebesar 3,77%, Bank Syariah Mandiri naik sebesar 5,66%, BRI Syariah mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 28,3% dan BNI Syariah naik sebesar 3,78%. Kemudian pada tahun 2019 Bank Muamalat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 3,77% dan beberapa Bank Syariah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu Bank Syariah Mandiri turun sebanyak 1,89% dan BRI Syariah turun sebanyak 13,21%. Sedangkan BNI Syariah tidak mengalami kenaikan atau dengan kata lain konstan tidak meningkat maupun menurun.

Hasil penelitian ini sekaligus memberikan konfirmasi terhadap penelitian Desy dkk (2017) bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia sudah seharusnya melaporkan CSR nya secara konsisten. Dari 4 (empat) Bank Syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini, 2 (dua) Bank Syariah yang mengungkapkan CSR berdasarkan indeks ISR dengan

konsisten. Sedangkan 2 (dua) Bank Syariah masih kurang konsisten dalam pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR. Oleh karena itu, sudah seharusnya Bank Umum Syariah di Indonesia dalam melaporkan CSR nya dengan menggunakan Indeks ISR sehingga pelaporan CSR berdasarkan Indeks ISR bukan lagi menjadi suatu hal yang suka rela namun menjadi hal yang wajib bagi entitas syariah.

Walaupun pada grafik di atas terlihat bahwa tingkat pengungkapan CSR pada Bank Syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan, namun tidak dapat menjadi jaminan bahwa untuk jangka waktu kedepan akan mengalami kenaikan dan penurunan.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Haris (2014) bahwa dapat dikatakan jika pada grafik menunjukkan perkembangan tingkat pengungkapan atau minimal tidak menurun, itu dikarenakan faktor perubahan pada jumlah item pengungkapan. Perusahaan bisa saja untuk mengungkapkan suatu item pada tahun sebelumnya namun tidak di tahun berikutnya, ataupun sebaliknya yang digantikan dengan pengungkapan item lainnya.



**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility atau kinerja sosial pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada tahun 2017-2019, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan keenam indikator berdasarkan *Islamic Social Reporting Indeks (ISR)* dari keempat sampel bank umum syariah tidak semua mengungkapkannya. Indikator yang pertama yaitu pendanaan dan investasi, pada indikator ini pengungkapan CSR yang memiliki skor tertinggi adalah Bank Muamalat Indonesia sebesar 83,33% sedangkan skor terendah pada BRI Syariah sebesar 72%. Indikator yang kedua adalah Produk dan Jasa, pada indikator ini pengungkapan CSR Bank Muamalat Indonesia mendapatkan skor terendah yaitu 78% sedangkan bank yang lainnya memiliki skor yang sama yaitu 100%. Indikator yang ketiga yaitu karyawan, pada indikator ini pengungkapan CSR Bank Syariah Mandiri memiliki skor tinggi 79,48% dan BRI Syariah memiliki skor terendah 61,53%. Indikator keempat yaitu masyarakat, pada indikator ini pengungkapan CSR BRI Syariah mendapat skor tinggi 90,91% dan Bank Muamalat memiliki skor rendah 66,67%. Indikator kelima yaitu lingkungan, pada indikator ini pengungkapan CSR BNI Syariah memiliki skor tertinggi sebesar 73% dan Bank Syariah Mandiri memiliki skor terendah 47%. Indikator terakhir yaitu tata kelola perusahaan, pada indikator ini pengungkapan CSR yang telah di ungkapkan oleh keempat sampel bank umum syariah yaitu Bank Muamalat dan Bank BNI mendapat skor tinggi 100% sedangkan terendah terdapat pada BRI Syariah dengan skor 84,56%.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penulis dan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Regulator

Bagi regulator yang mengatur perbankan syariah di Indonesia, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan agar membuat standar pelaporan terkait kinerja sosial untuk perbankan syariah. Dalam pembuatan standar pelaporan dapat mengacu pada Indeks ISR.

### 2. Bagi Bank Syariah

Bagi bank syariah agar terus meningkatkan tingkat pengungkapan kinerja sosialnya melalui *annual report* atau media komunikasi lainnya. Selain isu-isu sosial yang sudah menjadi isu global saat ini, aspek sosial juga merupakan amanah dari agama Islam itu sendiri. Pengungkapan kinerja sosial juga sebagai bentuk upaya meningkatkan kepercayaan *stakeholder* atau publik.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tingkat pengungkapan kinerja sosial bank syariah dengan menggunakan indeks ISR hendaknya terus mengembangkan tema-tema indeks ISR sehingga bisa benar-benar relevan untuk di aplikasikan pada bank syariah. selain itu, peneliti menyarankan sampel yang digunakan bisa selain BUS di Indonesia dan jumlah periode bisa di perbanyak agar hasil penelitian dapat digeneralisir dengan tepat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Afandi, Aprilian Ahmad, dkk, (2019). Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap Reputasi Perusahaan. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol 07 No. 1
- Alamsyah, H. (2010). *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia*.
- Andrianto dan Firmansyah, Anang (2019) *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*
- Anggrahini, Merry, (2015). Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting Indeks*. Artikel Ilmiah
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Apriyanti, Hani Werdi, (2017). Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Maksimum*, Vol. 1, No.1, September 2017
- Brilyanti, Farida Ayu, (2017). Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* Pada Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2015
- Dermawati. (2014). *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*
- Desiana, (2018). Pelaporan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah *Entreprise Theory*. *Jurnal Akuntansi* Vol. 13 No. 1.
- Effendi, Arif. (2014). Industri Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Wahana Akademika* Vol. 1 No. 2
- Fauziah, Khusnul, dkk. (2013). Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting Indeks*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 5, No. 1.
- Gustian Vena, (2015). Analisis Perbandingan Penggunaan GRI Indeks dan ISR Indeks dalam pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Indonesia
- Haniffa, R. (2002). *Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*. *Indonesian Management & Accounting Research* Vol. 1 No.2

- Hidayanti Ery, Sunyoto. (2012). Pentingnya Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan Dalam Meminimalisasi Asimetri Informasi. *Jurnal WIGA* Vol. 2 no. 2
- Isnawati, (2018). Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Tiga Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akutansi* Vol. 6 No. 1
- Junaidi. Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting Index*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* hlm 79.
- Kharisma Indra, Mawardi Imron. (2014). Implementasi Islamic corporate Social responsibility (CSR) Pada PT .Bumi Lingga Pertiwi di Kabupaten Gresik. *JESTT* Vol 1. No. 1
- Marthin. (2017). Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Journal Of Private And Commercial Law* Vol. 1 No. 1
- Maryani. Wewenag dan Tangung Jawab dalam Al-Qur'an dan Hadist
- Merina, Citra Indah, dkk. (2016). Pengungkapan Indeks *Islamic Social Reporting* Perusahaan Go Publik yang Listing di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah MBiA* Vol. 15 No 1
- Mubarok, Ferry Khusnul. (2019). Analisis Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Berlabel Syariah di Bursa Efek Indonesia. *MediaTrend* 14 (2)
- Muslihati, Siradjuddin, dkk. (2018). *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 1
- Nayenggita, Gina Bunga, dkk. (2019). Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 2 No. 1.
- Nurdizal, Efendi Asep, dkk. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Depok: Penebar Swadaya
- Novarianto, Fariz. (2017). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Citra Perusahaan PT. Beiersdorf Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 42 no. 2
- Putra, Haris Fifta. (2014). Analisis Pelaksanaan Dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

- Putu, Antamini Sari. (2012). Pengaruh Tingkat Pengungkapan Wajib dan Pengungkapan Sukarela Terhadap Biaya Modal Ekuitas. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol 3 no 3
- Qulub, Moh. Ahsanul, dkk. (2019). Analisis Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR). *E-JRA* Vol. 08 No. 03.
- Rahayu, Ribut Sri dan Cahyati, Ari Dewi. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Csr) Pada Perbankan Syariah. *JRAK* Vol. 5 No. 2 Agustus 2014 Hal. 74-87
- Sawitri, Desy Retma, dkk. (2017). Analisis Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting Index*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. XV No.2.
- Sefty Dien, Fariyah Iftahul. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Perusahaan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2014). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 3 No. 2
- Shihab M. Quraish. (2004). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lentara Hati
- Subroto, Bambang (2014). *Pengungkapan Wajib Perusahaan Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*
- Syahputri, Andriyani Yulia dan Surenggono (2019). Analisis Perbandingan Penggunaan *Global Reporting Initiative Index* dan *Islamic Sosial Reporting Index* dalam Pengungkapan *Corporate Social Reporting Responsibility* Perbankan Ssyariah di Indonesia Tahun 2014-2018. *Jurnal Liability* Vol. 1 No. 2
- Syairozi M. Imam (2019). *Pengungkapan CSR pada Perusahaan Manufaktur dan Perbankan*. Magelang: Tidar Media
- Teguh, M. (2015). *Metode Kuantitatif Untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers
- Widiawati, Septi (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Perusahaan-Perusahaan yang Terdapat pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011.

Yaya, Rizal, dkk. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat

Yusuf, Yasir. (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*. Depok: Kencana

Zanariyatim, Apip, dkk. (2016). Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Vol. 4, No. 1.

#### **WEBSITE**

Bank Muamalat Indonesia. (t.thn.). *Laporan Tahunan Periode 2017-2019*, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com)

Bank Syariah Mandiri. (t.thn.). *Laporan Tahunan Periode 2017-2019*, dari [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id)

BRI Syariah. (t.thn.). *Laporan Tahunan Periode 2017-2019*, dari [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

BNI Syariah. (t.thn.). *Laporan Tahunan Periode 2017-2019*, dari [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

Otoritas Jasa Keuangan, dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)



**IAIN PURWOKERTO**



**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**IAIN PURWOKERTO**

Lampiran 1. Pengungkapan Bank Muamalat Indonesia

NO	ITEM PENGUNGKAPAN ISR	2017	2018	2019
<b>A</b>	<b>Pendanaan Dan Investasi</b>			
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan)	1	1	1
2	Kegiatan yang mengandung Gharar (hedging, future on delivery trading/margin trading, arbitrage baikspot maupun forward, short selling, pure swap, warrant)	1	1	1
3	Zakat (jumlah, dan penyaluran)	1	1	1
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih)	0	0	0
5	Kegiatan investasi (secara umum)	1	1	1
6	Proyek pembiayaan (secara umum)	1	1	1
<b>B</b>	<b>Produk Dan Jasa</b>			
7	Penyertaan DPS terhadap kehalalan produk dan jasa baru	1	0	0
8	Jenis dan definisi setiap produk	1	1	1
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	1	1	1
<b>C</b>	<b>Karyawan</b>			
10	Jumlah karyawan	1	1	1
11	Jam Kerja	0	0	1
12	Hari libur	0	0	1
13	Tunjangan karyawan	1	1	1
14	Kebijakan remunerasi	1	1	1
15	Pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	1	1	1
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	1	0	1

18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1	1	1
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	1	1	1
20	Tempat ibadah yang memadai	0	0	0
21	Waktu ibadah/kegiatan religious	0	0	0
22	Kesejahteraan karyawan	1	1	1
<b>D</b>	<b>Masyarakat</b>			
23	Sedekah/Donasi (Jumlah dan penyalurannya)	1	1	1
24	Wakaf (Jenis dan penyaluran)	0	1	1
25	Qard Hasan/pinjaman kebajikan (Jumlah dan penyaluran)	1	1	1
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	0	0	0
27	Pemberian beasiswa sekolah	1	1	1
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	0	0	0
29	Pengembangan generasi muda	0	1	0
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	0	1	1
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	0	1
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan massal, pembangunan infrastruktur, dll)	1	1	1
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan, dan keagamaan)	1	1	1
<b>E</b>	<b>Lingkungan</b>			
34	Konservasi lingkungan hidup	1	1	1
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan airbersih, dll)	1	1	1

36	Pendidikan terhadap lingkungan hidup	0	1	1
37	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	0	1	0
38	Sistem manajemen lingkungan hidup	0	0	0
<b>F</b>	<b>Tata Kelola Perusahaan</b>			
39	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1	1	1
40	Pendapatan dan penggunaan dana non- halal	1	1	1
41	Struktur kepemilikan saham	1	1	1
42	Kebijakan anti korupsi	1	1	1
43	Kebijakan anti penyaluran dana kegiatan anti terorisme	1	1	1
44	Perkara hokum	1	1	1
45	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	1	1
46	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
47	Remunerasi dewan komisaris	1	1	1
48	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	1	1
49	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
50	Remunerasi dewan direksi	1	1	1
51	Rincian nama dan profil DPS	1	1	1
52	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
53	Remunerasi DPS	1	1	1
	<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>



Lampiran 2. Pengungkapan Bank Syariah Mandiri

NO	ITEM PENGUNGKAPAN ISR	2017	2018	2019
<b>A</b>	<b>Pendanaan Dan Investasi</b>			
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan)	0	0	1
2	Kegiatan yang mengandung Gharar (hedging, future on delivery trading/margin trading, arbitrage baikspot maupun forward, short selling, pure swap, warrant)	1	1	1
3	Zakat (jumlah, dan penyaluran)	1	1	1
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih)	0	0	0
5	Kegiatan investasi (secara umum)	1	1	1
6	Proyek pembiayaan (secara umum)	1	1	1
<b>B</b>	<b>Produk Dan Jasa</b>			
7	Penyertaan DPS terhadap kehalalan produk dan jasa baru	1	1	1
8	Jenis dan definisi setiap produk	1	1	1
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	1	1	1
<b>C</b>	<b>Karyawan</b>			
10	Jumlah karyawan	1	1	1
11	Jam Kerja	0	1	1
12	Hari libur	0	1	1
13	Tunjangan karyawan	1	1	1
14	Kebijakan remunerasi	1	1	1
15	Pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	1	1	1
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	1	1	1

18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1	1	1
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	0	0	0
20	Tempat ibadah yang memadai	0	0	0
21	Waktu ibadah/kegiatan religious	1	1	1
22	Kesejahteraan karyawan	1	1	1
<b>D</b>	<b>Masyarakat</b>			
23	Sedekah/Donasi (Jumlah dan penyalurannya)	1	0	0
24	Wakaf (Jenis dan penyaluran)	0	1	0
25	Qard Hasan/pinjaman kebajikan (Jumlah dan penyaluran)	1	1	1
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	0	1	0
27	Pemberian beasiswa sekolah	1	1	1
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	1	1	1
29	Pengembangan generasi muda	1	1	1
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	1	1	1
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	1	1
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur, dll)	1	1	1
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan, dan keagamaan)	1	1	1
<b>E</b>	<b>Lingkungan</b>			
34	Konservasi lingkungan hidup	1	1	1
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan airbersih, dll)	1	1	1

<b>36</b>	Pendidikan terhadap lingkungan hidup	0	0	0
<b>37</b>	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	1	0	0
<b>38</b>	Sistem manajemen lingkungan hidup	0	0	0
<b>F</b>	<b>Tata Kelola Perusahaan</b>			
<b>39</b>	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1	1	1
<b>40</b>	Pendapatan dan penggunaan dana non- halal	1	1	1
<b>41</b>	Struktur kepemilikan saham	1	1	1
<b>42</b>	Kebijakan anti korupsi	0	1	1
<b>43</b>	Kebijakan anti penyaluran dana kegiatan anti terorisme	1	1	
<b>44</b>	Perkara hokum	1	1	1
<b>45</b>	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	1	1
<b>46</b>	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
<b>47</b>	Remunerasi dewan komisaris	1	1	1
<b>48</b>	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	1	1
<b>49</b>	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
<b>50</b>	Remunerasi dewan direksi	1	1	1
<b>51</b>	Rincian nama dan profil DPS	1	1	1
<b>52</b>	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
<b>53</b>	Remunerasi DPS	1	1	1
	<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>44</b>

Lampiran 3. Pengungkapan BRI Syariah

NO	ITEM PENGUNGKAPAN ISR	2017	2018	2019
<b>A</b>	<b>Pendanaan Dan Investasi</b>			
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan)	0	1	1
2	Kegiatan yang mengandung Gharar (hedging, future on delivery trading/margin trading, arbitrage baikspot maupun forward, short selling, pure swap, warrant)	0	1	1
3	Zakat (jumlah, dan penyaluran)	1	1	1
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih)	0	0	0
5	Kegiatan investasi (secara umum)	1	1	1
6	Proyek pembiayaan (secara umum)	1	1	1
<b>B</b>	<b>Produk Dan Jasa</b>			
7	Penyertaan DPS terhadap kehalalan produk dan jasa baru	1	1	1
8	Jenis dan definisi setiap produk	1	1	1
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	1	1	1
<b>C</b>	<b>Karyawan</b>			
10	Jumlah karyawan	1	1	1
11	Jam Kerja	0	0	0
12	Hari libur	0	0	0
13	Tunjangan karyawan	1	1	1
14	Kebijakan remunerasi	0	1	1
15	Pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	0	1	1
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	1	1	0

18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1	1	1
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	0	1	1
20	Tempat ibadah yang memadai	0	0	0
21	Waktu ibadah/kegiatan religious	0	1	0
22	Kesejahteraan karyawan	1	1	1
<b>D</b>	<b>Masyarakat</b>			
23	Sedekah/Donasi (Jumlah dan penyalurannya)	1	1	1
24	Wakaf (Jenis dan penyaluran)	1	1	1
25	Qard Hasan/pinjaman kebajikan (Jumlah dan penyaluran)	1	1	1
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	1	1	1
27	Pemberian beasiswa sekolah	1	1	1
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	0	1	1
29	Pengembangan generasi muda	0	1	0
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	1	1	1
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	1	1
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur, dll)	1	1	1
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan, dan keagamaan)	1	1	1
<b>E</b>	<b>Lingkungan</b>			
34	Konservasi lingkungan hidup	1	1	1
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan airbersih, dll)	1	1	1

<b>36</b>	Pendidikan terhadap lingkungan hidup	0	1	1
<b>37</b>	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	0	1	0
<b>38</b>	Sistem manajemen lingkungan hidup	0	0	0
<b>F</b>	<b>Tata Kelola Perusahaan</b>			
<b>39</b>	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	0	1	1
<b>40</b>	Pendapatan dan penggunaan dana non- halal	0	1	0
<b>41</b>	Struktur kepemilikan saham	1	1	1
<b>42</b>	Kebijakan anti korupsi	1	1	1
<b>43</b>	Kebijakan anti penyaluran dana kegiatan anti terorisme	1	1	1
<b>44</b>	Perkara hokum	1	1	1
<b>45</b>	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	1	1
<b>46</b>	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	0	1	1
<b>47</b>	Remunerasi dewan komisaris	1	1	1
<b>48</b>	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	1	1
<b>49</b>	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	0	1	1
<b>50</b>	Remunerasi dewan direksi	1	1	1
<b>51</b>	Rincian nama dan profil DPS	1	1	1
<b>52</b>	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	0	1	0
<b>53</b>	Remunerasi DPS	1	1	0
	<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>48</b>	<b>41</b>

Lampiran 4. Pengungkapan BNI Syariah

NO	ITEM PENGUNGKAPAN ISR	2017	2018	2019
<b>A</b>	<b>Pendanaan Dan Investasi</b>			
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan)	1	1	1
2	Kegiatan yang mengandung Gharar (hedging, future on delivery trading/margin trading, arbitrage baikspot maupun forward, short selling, pure swap, warrant)	0	1	1
3	Zakat (jumlah, dan penyaluran)	1	1	1
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih)	0	0	0
5	Kegiatan investasi (secara umum)	1	1	1
6	Proyek pembiayaan (secara umum)	1	1	1
<b>B</b>	<b>Produk Dan Jasa</b>			
7	Penyertaan DPS terhadap kehalalan produk dan jasa baru	1	1	1
8	Jenis dan definisi setiap produk	1	1	1
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	1	1	1
<b>C</b>	<b>Karyawan</b>			
10	Jumlah karyawan	1	1	1
11	Jam Kerja	0	0	0
12	Hari libur	0	0	0
13	Tunjangan karyawan	1	1	1
14	Kebijakan remunerasi	1	1	1
15	Pendidikan dan pelatihan karyawan	1	1	1
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	1	1	1
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	1	1	1

18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1	1	1
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	0	0	0
20	Tempat ibadah yang memadai	1	1	1
21	Waktu ibadah/kegiatan religious	1	1	1
22	Kesejahteraan karyawan	1	1	1
<b>D</b>	<b>Masyarakat</b>			
23	Sedekah/Donasi (Jumlah dan penyalurannya)	0	1	1
24	Wakaf (Jenis dan penyaluran)	1	1	1
25	Qard Hasan/pinjaman kebajikan (Jumlah dan penyaluran)	1	1	1
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	0	0	0
27	Pemberian beasiswa sekolah	1	1	1
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	1	0	0
29	Pengembangan generasi muda	1	1	1
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	1	1	1
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	1	1
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan massal, pembangunan infrastruktur, dll)	1	1	1
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan, dan keagamaan)	1	1	1
<b>E</b>	<b>Lingkungan</b>			
34	Konservasi lingkungan hidup	1	1	1
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih, dll)	1	1	1



36	Pendidikan terhadap lingkungan hidup	1	1	1
37	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	0	0	0
38	Sistem manajemen lingkungan hidup	0	1	1
<b>F</b>	<b>Tata Kelola Perusahaan</b>			
39	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1	1	1
40	Pendapatan dan penggunaan dana non- halal	1	1	1
41	Struktur kepemilikan saham	1	1	1
42	Kebijakan anti korupsi	1	1	1
43	Kebijakan anti penyaluran dana kegiatan anti terorisme	1	1	1
44	Perkara hokum	1	1	1
45	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	1	1
46	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
47	Remunerasi dewan komisaris	1	1	1
48	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	1	1
49	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
50	Remunerasi dewan direksi	1	1	1
51	Rincian nama dan profil DPS	1	1	1
52	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
53	Remunerasi DPS	1	1	1
	<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>46</b>



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-636624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Hal : Permohonan Persetujuan Judul Skripsi  
Kepada:  
Yth. Dekan FEBI  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

Purwokerto, 29 Maret 2021

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:

1. Nama : Savitri Devi Aaryani
2. NIM : 1717202046
3. Semester : VIII
4. Prodi : Perbankan Syariah
5. Tahun Akademik : 2020/2021

Dengan ini saya mohon dengan hormat untuk menyetujui judul skripsi saya guna melengkapi sebagian syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah:


**ANALISIS PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX (STUDI KASUS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017-2019)**

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: Ubaidillah S.E., M.E.I


Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alikumWr. Wb.*

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

  
Ubaidillah S.E., M.E.I  
NIP. 19880924 201903 1 008

Hormat Saya,

  
Savitri Devi Aaryani  
NIM. 1717202046

Menyetujui  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



  
Yoiz Sholwa Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

Tembusan:

1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag AKA
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128  
Telp : 0281-635624, 628250 Fax : 0281-635553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : 001/In.17/FEBIJ.PS/PP.009/I/2021  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Purwokerto, 04 Januari 2021

Kepada:  
Yth. Bapak Ubaidillah, S.E., M.E.I  
Dosen Tetap IAIN Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto pada tanggal 23 Desember 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 23 Desember 2020 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Savitri Devi Aryani  
NIM : 1717202046  
Semester : VII  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2019)

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Jurusan Perbankan Syariah  
  
Yoz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-636624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

---

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto No. 001/In.17/FEBJ.PS/PP.009/XII/2020 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Savitri Devi Aryani NIM1717202046

Judul Skripsi : Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah

Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2019)

Saya menyatakan bersedia menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 04 Januari 2021

Ubaidillah, S.E., M.E.I  
NIP. 19880924 201903 1 008

*Catatan: \*Coret yang tidak perlu*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-536553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 0804/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/III/2021

Purwokerto, 29 Maret 2021

Lamp : -

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Ubaidillah S.E., M.E.I

Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Di

Purwokerto

*Assalamu 'alaikumWr. Wb.*

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tanda tangani atas nama:

1. Nama : Savitri Devi Aryani
2. NIM : 1717202046
3. Semester : VIII
4. Prodi : Perbankan Syariah
5. Alamat : Jl. Bahari Rt 07 Rw 07, Tegal Kamulyan, Cilacap Selatan, Cilacap
6. Judul Skripsi : Analisis Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah Berdasarkan *Islamic Social Reporting Index* (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019)

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alikumWr. Wb.*

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



*[Signature]*  
Ybs. Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL**

Nomor: 887/In.17/FEBIJ.PS/PP.009/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Savitri Devi Aryani  
NIM : 1717202046  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Pembimbing : Ubaidillah, S.E., M.E.I  
Judul : Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index

Pada tanggal 08/04/2021 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 09 April 2021  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



**Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.**  
NIP. 19781231 200801 2 027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-835624 Fax. 0281-836553; febi.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor: 1572/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/VII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Savitri Devi Aryani

NIM : 1717202046

Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 05/07/2021 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,  
dengan nilai : 77 / B+

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal 6 Juli 2021  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



**Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.**  
NIP. 19781231 200801 2 027

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Savitri Devi Aryani  
NIM : 1717202046  
Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 09 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Sarto  
Nama Ibu : Darini  
Alamat : Jln. Bahari RT07/RW07, Kec.Cilacap Selatan,  
Kab.Cilacap  
No. HP : 085647932761  
E-mail : [deviaryani360@gmail.com](mailto:deviaryani360@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1) Pendidikan formal

TK : TK IT BIAS Cilacap  
SD : SD IT BIAS Cilacap  
SMP : SMP N 4 Cilacap  
SMA : SMA AL-IRSYAD Cilacap

#### 2) Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Nurussyifa Sumampir

### C. Pengalaman Organisasi

1. HMI Komisariat FEBI IAIN Purwokerto
2. KSEI IAIN Purwokerto
3. Anggota Islamic Bank in Laboratory (IBiL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam